

LAPORAN PENELITIAN

**PENGARUH KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
TERHADAP PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

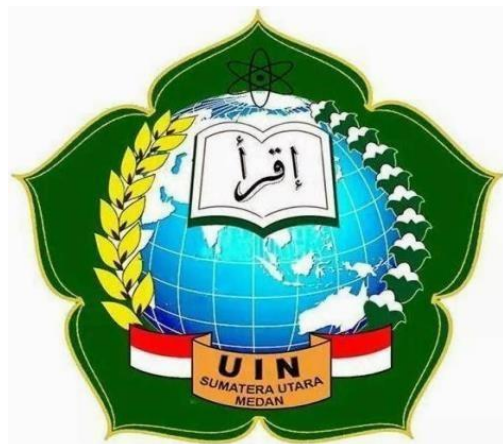
**(Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Cengkeh Turi Binjai Utara Kota Binjai Sumatera
Utara)**

OLEH :

**KETUA SRI RAMADHANI, MM
NIP. 197510152005012004**

**ANGGOTA DR.SAJARATUD DUR, MT
NIP. 197310132005012005**

**PRATIWI MEI LESTARI HARAHAP
NIP. -**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN**

2022 M / 1444 H

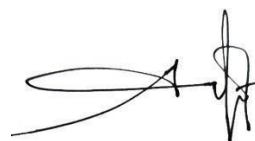
LEMBAR PENGESAHAN**Penulis 1****NAMA : SRI RAMADHANI, MM****NIP 197510152005****Penulis 2****NAMA : DR. SAJARATUD DUR,MT****NIP : 197310132005012005****Penulis 3****NAMA : PRATIWI MEI LESTARI BR. HARAHAP****NIP : -****JUDUL PENELITIAN : PENGARUH KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TERHADAP PENANGGULANGAN KEMISKINAN (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Cengkeh Turi Binjai Utara Kota Binjai Sumatera Utara)**

Medan, 12 Juli 2022

KETUA LP2M

**DR. HASANSAZALL. MAg**
NIP. 19760222 200701 1 018

KETUA PENELITI

**SRI RAMADHANI. MM**
NIP. 197510152005012004**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN**

2022 M / 1443 H

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan pada masyarakat Penerima PKH yang telah Bergraduasi dan membuka usaha. Tujuan penelitian ini adalah, untuk mengetahui bantuan (KPM) pengaruh PKH terhadap penanggulangan Kemiskinan dan mengkaji kecakapan masyarakat Penerima bantuan PKH dalam mengelola dan mengalokasikan dana Bantuan untuk mencapai kesejahteraan keluarga atau lepas dari rantai kemiskinan dalam membuat Usaha kecil maupun UMKM. Metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan model regresi sederhana dan pengujian metode uji statistik IBM SPSS 22 *Statistic for windows*. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 30 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai nilai r hitung sebesar 0,62 yang berarti dapat dikatakan bahwa adanya hubungan atau korelasi antara variabel (X) Program Keluarga Harapan (PKH) dan variabel (Y) Penanggulangan Kemiskinan. Hasil Koefisien determinan memiliki tingkat persentase sebesar 37, 95%, Berdasarkan analisis data uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung < t tabel yaitu memiliki nilai $0,756 < t$ tabel sebesar 1,703 maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang artinya bahwa variabel (X) secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel (Y), dimana hasil hipotesisnya diterima dan terbukti setelah dihitung menggunakan rumus regresi sederhana yaitu $Y=11,6 + 0,756X$. diartikan bahwa konstanta sebesar 11,6 artinya tanpa ada Program Keluarga Harapan (PKH) serta memiliki koefisien regresi sebesar 0,756%.

Keywords : PKH, Penanggulangan Kemiskinan, UMKM.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum
Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian yang berjudul **PENGARUH KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TERHADAP PENANGGULANGAN KEMISKINAN (Studi Kasus Desa Masyarakat Kelurahan Cengkeh Turi Binjai Utara Kota Binjai Sumatera Utara)**

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun manusia kejalan yang lurus untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Penulis juga ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada suami tercinta dan anak-anak tersayang yang telah tulus dan ikhlas memberikan kasih sayang, doa, semangat, dan pengorbanan baik secara moril maupun material selama penyelesaian.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan, hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis sangat memerlukan kritik dan saran serta bimbingan yang membangun demi penulisan penelitian yang lebih baik.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Batasan Masalah	9
D. Perumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	10
BAB II : KERANGKA TEORETIK	12
A. Deskripsi Teoretik	12
1. PKH	12
a. Pengertian PKH	12
b. Komponen Bantuan Sosial PKH	14
2. Kemiskinan	15
a. Pengertian Kemiskinan	15
b. Kemiskinan Dalam Pandangan Islam	20

c.. Bentuk- Bentuk Kemiskinan	24
d. Solusi Al-Qur'an dalam menuntaskan Kemiskinan	25
3. UMKM	28
a. Pengertian UMKM.....	29
b. Kriteria UMKM	30
c. Kebijakan Pemerintah	31
B. Penelitian Yang Relevan	38
C. Kerangka Berpikir	40
D. Hipotesis Penelitian	41
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	43
A. Tempat Dan Waktu Penelitian	43
B. Metode Penelitian	44
C. Populasi Dan Sampel	46
D. Instrumen Penelitian	48
E. Teknik Analisis Data	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. Gambaran Umum PKH	56
B. Analisis Deskriptif Data Penelitian	80
C. Hasil Uji Hipotesis	89
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	102

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

SURAT PENELITIAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DOKUMENTASI PENELITIAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kota Binjai, 2012 – 2019	20
Tabel 4.1	Nama dan Jenis UMKM Responden.....	71
Tabel 4.2	Usia	72
Tabel 4.3	Pendapatan	73
Tabel 4.4	Jenis Pekerjaan.....	73
Tabel 4.5	Uji Validitas Variabel X	81
Tabel 4.6	Uji Validitas Variabel Y	83
Tabel 4.7	Uji Reliabilitas	85
Tabel 4.8	Uji Regresi Nilai Linear Sederhana	87
Tabel 4.9	Uji Korelasi (Uji T).....	88
Tabel 4.10	Koefisien Product Momen	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kota Binjai, 2012 – 2021	96
Gambar 2.1	Cakupan PKH Tahun 2007 s.d. 2018.....	13
Gambar 4.1	Struktur Organisasi PKH Kota Binjai	67
Gambar 4.2	Logo PKH	77
Gambar 4.3	Diagram Persentase Tingkat Graduasi Mandiri anggota PKH Kota Binjai	80
Gambar 4.4	Diagram scoring PKH dari Hasil Jawaban Responden.....	86
Gambar 4.5	Diagram scoring Penanggulangan Kemiskinan dari Hasil Jawaban Responden	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pradigma pembangunan ekonomi selama ini banyak ketergantungan dengan pertumbuhan ekonomi (*growth*). Pertumbuhan ekonomi (*growth*) adalah proses kenaikan produksi atau perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu Negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik apabila *Gross domestic product* (GDP) riil Negara tersebut meningkat, dan kemudian hal ini dijadikan sebagai salah satu indikator untuk mengukur perkembangan ekonomi.¹ Hal tersebut menimbulkan pertanyaan apakah kenaikan GDP sudah dibarengi dengan penurunan angka kemiskinan?

Tingkat kemiskinan di Indonesia menunjukkan *trend* penurunan setiap tahunnya meski penurunannya semakin lambat. Hal ini menjadi sebuah keprihatinan bersama dan bisa menjadi sebuah gambaran kecil bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia belum bisa terintegrasi secara baik antara sektor moneter dan sektor riil sehingga menimbulkan kesenjangan yang tinggi karena disebabkan distribusi yang tidak merata.²

Kemiskinan merupakan masalah utama Negara Indonesia yang sampai saat ini belum terpecahkan bagaimana cara untuk menuntaskannya. Tujuan penanggulangan kemiskinan ini agar menciptakan masyarakat yang bermartabat sesuai dengan

¹ Nurul Huda, dkk. *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta : Terbit Kencana, 2015), hlm.8.

² *Ibid.*, hlm.9.

pancasila sila ke lima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tingkat kemiskinan dari era kemerdekaan sampai saat ini menjadi pusat perhatian. Pada tingkat era kabinet kerja upaya penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas dari 9 (sembilan) agenda utama (nawacita) yang menjadi acuan pelaksanaan pembangunan periode 2015-2019, yakni meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut, pada tahun 2014 telah dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 166 tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. Peraturan tersebut merupakan wujud nyata dari komitmen besar pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan.³

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:

1. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
2. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial,

³ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.⁴

Dalam point pasal kedua dapat disimpulkan pemerintah melakukan penekanan terhadap kemiskinan dengan cara melakukan kebijakan beberapa program salah satunya yang sangat umum diketahui secara *universal* yaitu Program PKH (Program Keluarga Harapan).

PKH adalah sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar masyarakat. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut.

Menurut Slamet Agus Purwanto, dkk mengungkapkan bahwa :

“Dan disadari sepenuhnya bahwa PKH ini dilakukan melalui pendekatan kesejahteraan bagi keluarga miskin dengan cara memberikan bantuan tunai langsung kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) dengan persyaratan yang telah ditentukan. Namun demikian tetaplah harus dipahami bahwa proses pengentasan kemiskinan melalui PKH ini bukanlah sebuah proses yang mudah, melainkan sebuah proses yang membutuhkan kemampuan baik (*political will*), baik dari pemerintah (sebagai unsur pendukung) maupun dari komponen masyarakat terutama masyarakat miskin. Sebab belajar dari pengalaman berbagai program penanggulangan pengentasan kemiskinan yang selama ini ada yang bersifat parsial, kenyataanya sering menghadapi kondisi yang kurang menguntungkan, karena penanggulangan kemiskinan yang ada saat ini hanya bersifat jangka pendek, tidak meningkatkan kualitas manusia, seharusnya program-program yang diberikan kepada masyarakat haruslah program yang meningkatkan kualitas manusia seperti memperbaiki pendidikan dan kesehatan, karena untuk keluar dari lingkaran kemiskinan jalan satusatunya dapat diwujudkan jika masyarakat itu sehat dan cerdas.

⁴ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Dengan masyarakat sehat dan pintar masyarakat itu dapat keluar dari lingkaran kemiskinan dengan cara mereka sendiri.”⁵

Jadi bisa disimpulkan bahwa bantuan sosial dalam bentuk uang atau modal untuk penanggulangan kemiskinan tidak akan menuntaskan kemiskinan itu sendiri. Karena membantu dengan bantuan uang dan hanya dimanfaatkan untuk pemenuhan hidup akan bersifat pendek. Tetapi jika bantuan yang diberikan dapat diolah dengan cerdas dan kreatif yaitu dengan membuka sebuah usaha kecil agar menuntaskan kemiskinan di keluarga sendiri. Usaha yang diharapkan melalui UMKM yang dibuka oleh KPM mampu membuat mereka keluar dari garis kemiskinan.

Usaha skala kecil di Indonesia merupakan subyek diskusi dan menjadi perhatian pemerintah karena perusahaan kecil tersebut menyebar dimana-mana, dan dapat memberi kesempatan kerja yang potensial. Para ahli ekonomi sudah lama menyadari bahwa sektor industri kecil sebagai salah satu karakteristik keberhasilan dan pertumbuhan ekonomi. Industri kecil menyumbang pembangunan dengan berbagai jalan, menciptakan kesempatan kerja, untuk perluasan angkatan kerja bagi urbanisasi, dan menyediakan fleksibilitas kebutuhan serta inovasi dalam perekonomian secara keseluruhan.⁶

⁵ Slamet Agus Purwanto, dkk (2013). “*Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Memutus Rantai Kemiskinan* (Kajian Di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto)”*Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol 16, No. 2 (2013), Hlm.82.

⁶ Muhammad Alauddin, LC, *Fungsi Umkm Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat*, qiema (qomariddin Islamic economy magazine) vol. 5 No.1, Februari 2019, p-issn: 2528-2913, hlm.82.

Kota Binjai adalah salah satu kota yang mengikuti dan berperan serta dalam program pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan, salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Di Kota Binjai sendiri, PKH mulai ada sejak tahun 2014 yang memiliki jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH sebanyak 1.672.

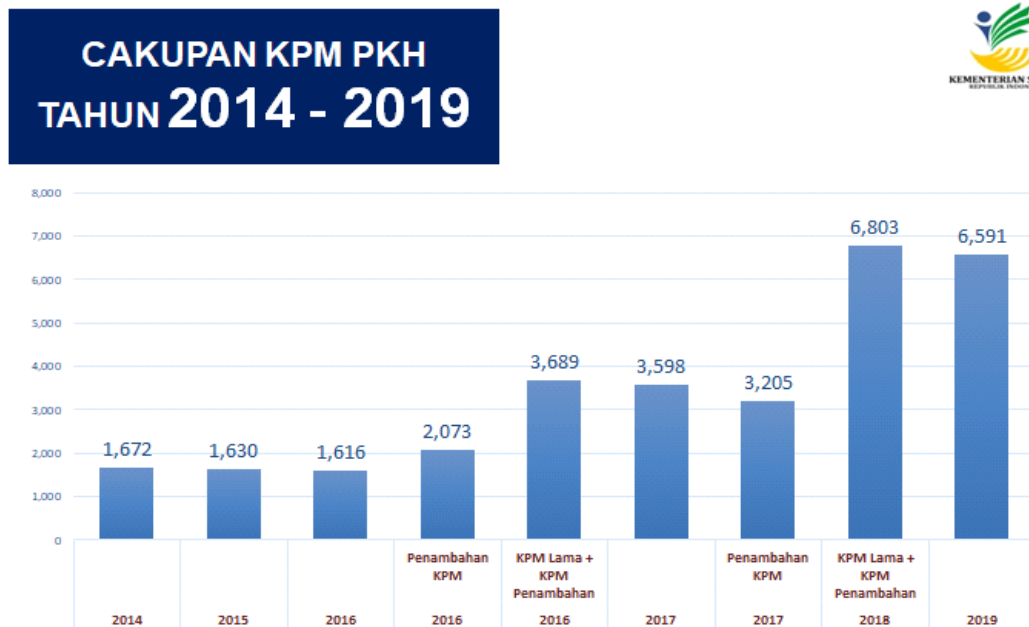
Kemudian, pada tahun 2016 dan 2017 PKH Kota Binjai mendapatkan penambahan sasaran penerima manfaat Program Keluarga Harapan dari PKH Pusat sebanyak 2.073 KPM (*tahun 2016*) dan 3.205 KPM (*tahun 2017*) yang tentunya sudah dilakukan validasi data sesuai kriteria yang ditetapkan dan memiliki komponen bantuan PKH.⁷

Seiring waktu berjalan data Keluarga Penerima Manfaat PKH tentunya ada yang mengalami perubahan, seperti: sudah tidak memiliki komponen PKH lagi, pindah keluar Kab/Kota, meninggal dunia, mundur dari kepesertaan PKH secara mandiri, dll. Maka jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH Kota Binjai semakin berkurang dan sekarang jumlah Keluarga Penerima Manfaat PKH berjumlah 6.591 KPM.⁸ Kondisi PKH saat ini dari tahun ke tahun mengalami peningkatan jumlah KPM. Artinya semakin banyak penerima PKH ditambah PKH yang lama dengan baru hal ini yang menimbulkan beberapa pertanyaan mengapa KPM lama tidak Graduasi Mandiri banyak agar KPM yang baru yang lebih banyak

⁷ Sumber Data dari data Kantor PKH kota Binjai.

⁸ Sumber data diambil dari Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (*Peraturan Menteri Sosial Nomor 10/ HUK/2016 tanggal 3 Mei 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin*)

menggantikan yang lama untuk mendapatkan bantuan dibandingkan KPM lama tersebut?



Gambar 1.1 Grafik Cakupan KPM PKH Tahun 2014-2019.

Sumber : Data PKH kota Binjai

Hal tersebut tidak menunjukkan kesesuaian dari tujuan PKH itu sendiri yaitu Tujuan PKH adalah mengurangi angka kemiskinan dan memutus rantai kemiskinan antar-generasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan.

Presiden [Joko Widodo](#) meminta para Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) mengarahkan penggunaan dana bantuan dari program itu untuk kegiatan produktif. Jangan sampai, penerima PKH menggunakannya untuk kegiatan konsumtif.

"Dari sisi ekonomi, saya minta para pendamping bisa mengarahkan pengelolaan keuangannya, jangan sampai dipakai untuk konsumtif, harus produktif," kata Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan pada Jambore Sumber Daya Program Keluarga Harapan Tahun 2018 di Istana Negara Jakarta, Kamis (13/12).

Ia menyebutkan kalau ada kemampuan berdagang atau bisnis dari keluarga penerima manfaat (KPM) maka pendamping dapat mengarahkan mereka ke arah itu. "Itu cara paling cepat untuk mereka naik kelas atau keluar dari kelompok keluarga prasejahtera," katanya.

Pada awal pengarahannya, Presiden menyebutkan bahwa pembangunan sumber daya manusia juga merupakan prasyarat Indonesia dapat mencapai kemajuan. "Kalau infrastruktur sudah sementara SDM dilupakan ya kita akan sulit bersaing. Oleh sebab itu kita akan bergeser kepada pembangunan SDM," katanya.

Ia juga menginginkan masyarakat diarahkan tidak ada ketergantungan kepada program itu karena sifatnya sementara untuk masuk ke tingkat yang lebih tinggi dari prasejahtera.⁹

Dari wacana yang disampaikan presiden tersebut memiliki tujuan yang jelas bahwa setiap KPM diharapkan untuk mampu mengelola keuangan yang produktif untuk membuka sebuah usaha. Sehingga KPM mampu keluar dari PKH dengan

⁹ Ratna Puspita "Presiden Ingatkan Bantuan PKH untuk Kegiatan Produktif" diunduh oleh [republika.co.id](https://www.republika.co.id) pada Kamis 13 Desember 2018 pukul 13:31 WIB. <https://www.republika.co.id/>.

meningkatkan kesejahteraan ekonomi KPM tersebut. hal ini disebut sebagai Gradiasi Mandiri.

Graduasi Mandiri adalah KPM keluar dari Kepesertaan PKH secara mandiri karena ia sudah mampu dan meningkat taraf ekonominya sehingga ia mengundurkan diri dari PKH secara sukarela. Dengan membuat sebuah Usaha Mikro kecil Menengah.

Salah satu Anggota PKH yang sudah keluar dari kepesertaan adalah ibu Jumiaty, beliau sebelum mendapatkan bantuan PKH mempunyai pekerjaan berjualan pisang saleh tetapi tidak tetap karena modal yang terbatas sehingga pekerjaan lain dilakukan (pekerja serabutan). Seiring berjalannya waktu ibu jumiaty mendapatkan bantuan PKH pada tahun 2014 dengan anak yang masih bersekolah 3 orang yang masih ditanggung dengan keadaan seorang janda.

Awalnya bantuan PKH yang didapat ibu jumiaty dialokasikan khusus untuk biaya pendidikan anak dan kesehatan keluarga. Bantuan PKH yang didapat sangat dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Ketika di tahun 2018 dan 2 anak sudah pada bekerja dan berumah tangga bu jumiaty memutuskan untuk keluar dari kepesertaan PKH karena usaha beliau sudah cukup untuk kebutuhan hidupnya dan merasa sudah mampu. Dengan membuka sebuah usaha kedai sayuran yang ia ambil langsung dari pasar kemudian dijual menghasilkan untung yang lumayan besar. Alasan ibu Jumiaty membuka usaha karena ia merasa bekerja dengan orang lain tidak bisa terpenuhi dengan baik. Munculah ide untuk membuka kedai sayuran dimana sayuran merupakan bahan pokok utama konsumsi keluarga sehingga kemungkinan rugi hanya

sangat kecil.

Pendapatan ibu jumiati saat ini dalam sebulan menghasilkan kurang lebih Rp.5000.000,00. Alasan ibu jumiati pada saat itu keluar dari PKH adalah beliau merasa sudah bisa mencukupi kebutuhan keluarga dan kebutuhan anak sekolah dan merasa masih banyak yang lebih mampu untuk mendapatkan bantuan PKH tersebut.¹⁰

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Pengaruh Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Cengkeh Turi Binjai Utara Kota Binjai Sumatera Utara.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Tidak meratanya bantuan PKH pada semua klaster masyarakat miskin.
2. Minimnya KPM PKH yang bergraduasi mandiri di kota Binjai
3. Belum optimalnya realisasi tujuan kebijakan PKH dengan baik

C. Batasan Masalah

Untuk mencari hasil penelitian yang memusat dan tidak keluar dari permasalahan yang sesungguhnya maka penulis membatasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu Pengaruh Kebijakan Program Keluarga Harapan

¹⁰ Sumber data diambil dari hasil wawancara kepada ibu Jumiati di Cengkeh Turi tanggal 20 Oktober 2021 jam 11.00 WIB.

(PKH) terhadap penanggulangan Kemiskinan Di Kelurahan Cengkeh Turi Binjai Utara.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

Apakah Program PKH berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap penanggulangan tingkat kemiskinan Di Kelurahan Cengkeh Turi Binjai Utara?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh PKH terhadap penanggulangan tingkat kemiskinan di Kelurahan Cengkeh Turi Kec Binjai Utara.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Secara terperinci kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis

Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemikiran penulis baik secara teori maupun aplikasi tentang Pengaruh Kebijakan Program PKH terhadap penanggulangan Kemiskinan

2. Bagi Dinas Sosial di Bidang Program Keluarga Harapan (PKH)

Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Lembaga Program Kebijakan Pemerintah khususnya bagi PKH Binjai agar

terus semangat dan memberikan masukan hal yang positif dan membangun dalam menuntaskan kemiskinan secara signifikan.

3. Bagi Akademisi

Bagi Akademisi, penelitian ini akan menambah referensi kepustakaan di Bidang ilmu pengetahuan serta menjadi bahan referensi bagi penelitian lain.

BAB II

KERANGKA TEORETIK

A. Deskripsi Teoritik

1. PKH

a. Pengertian PKH

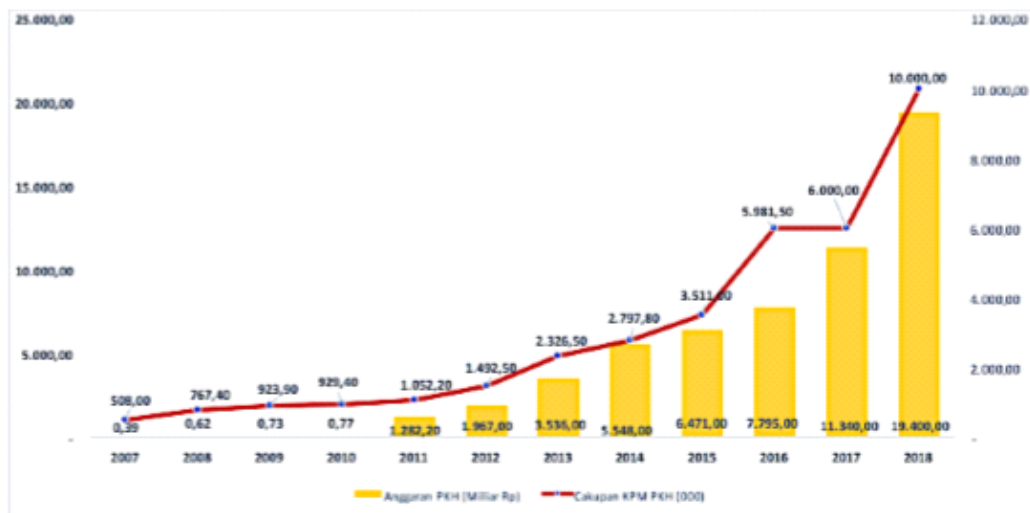
Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Program perlindungan sosial yang memberikan bantuan uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan syarat dapat memenuhi kewajiban terkait pendidikan dan kesehatan. PKH bertujuan untuk mengurangi beban rumah tangga sangat miskin dan diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi berikutnya agar dapat keluar dari kemiskinan.¹¹

Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.

Misi besar PKH untuk menurunkan kemiskinan semakin mengemuka mengingat jumlah penduduk miskin Indonesia sampai pada Maret tahun 2016 masih sebesar 10,86% dari total penduduk atau 28,01 juta jiwa (BPS, 2016). Pemerintah

¹¹ Baiq Reinelda Tri Yunarni.dkk, *Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengurangi Angka Kemiskinan (Studi: Desa Daha Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu)*, Jurnal Ilmu Administrasi Publik ISSN 2615-5826 , (FISIP UM Mataram Vol. 7 No. 2 September 2019), Hlm. 193-207.

telah menetapkan target penurunan kemiskinan menjadi 7-8% pada tahun 2019, sebagaimana tertuang di dalam RPJMN 2015-2019. PKH diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, menurunkan kesenjangan (*gini ratio*) seraya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).¹²



Gambar 2.1. Cakupan PKH Tahun 2007 s.d. 2018

Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa PKH memberikan dampak terhadap perubahan konsumsi rumah tangga, seperti di beberapa negara pelaksana CCT lainnya. PKH berhasil meningkatkan konsumsi rumah tangga penerima manfaat di Indonesia sebesar 4,8%.

¹² Kementerian Sosial RI, *Program Keluarga Harapan (PKH)*, <https://kemsos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh> di unduh pada tanggal 09 Agustus 2019 oleh admin kementerian sosial RI irwan susanto.

1. Tahun 2010 - 2014 terjadi peningkatan target penerima manfaat dan alokasi budget PKH, melampaui *baseline* target perencanaan
2. Pelaksanaan PKH tahun 2016 sebanyak 6 juta keluarga miskin dengan anggaran sebesar Rp. 10 Triliun
3. Jumlah penerima PKH tahun 2017 sebanyak 6.228.810 keluarga dengan anggaran sebesar Rp. 11,5 Triliun
4. Target penerima PKH tahun 2018 sebanyak 10 juta KPM dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 19,4 Triliun

KPM PKH harus terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat. Kewajiban KPM PKH di bidang kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbang badan anak balita dan anak prasekolah. Sedangkan kewajiban di bidang pendidikan adalah mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga PKH ke satuan pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar dan menengah. Dan untuk komponen kesejahteraan sosial yaitu penyandang disabilitas dan lanjut usia mulai 60 tahun.¹³

b. Komponen Bantuan Sosial PKH

Bantuan sosial PKH pada tahun 2019 terbagi menjadi dua jenis yaitu Bantuan Tetap dan Bantuan Komponen yang diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

¹³Kementrian Sosial RI, *Program Keluarga Harapan (PKH)*, <https://kemsos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh> di unduh pada tanggal 09 Agustus 2019 oleh admin kementerian sosial RI irwan susanto.

A. Bantuan Tetap untuk Setiap Keluarga

1. Reguler : Rp. 550.000,- / keluarga / tahun
2. PKH AKSES : Rp. 1.000.000,- / keluarga / tahun

B. Bantuan Komponen untuk Setiap Jiwa dalam Keluarga PKH

1. Ibu hamil : Rp. 2.400.000,-
2. Anak usia dini : Rp. 2.400.000,-
3. SD : Rp. 900.000,-
4. SMP : Rp. 1.500.000,-
5. SMA : Rp. 2.000.000,-
6. Disabilitas berat : Rp. 2.400.000,-
7. Lanjut usia : Rp. 2.400.000,-

Bantuan komponen diberikan maksimal untuk 4 jiwa dalam satu keluarga.¹⁴

2. Kemiskinan

a. Pengertian Kemiskinan

Secara etimologis, kemiskinan berasal dari kata “miskin” yang artinya tidak berharta benda dan serba kekurangan. “kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Maksudnya kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non-makanan yang disebut garis kemiskinan atau batas kemiskinan”¹⁵

¹⁴ Kementerian Sosial RI, *Program Keluarga Harapan (PKH)*, <https://kemsos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh> di unduh pada tanggal 09 Agustus 2019 oleh admin kementerian sosial RI irwan susanto.

¹⁵Nurhadi, *Mengembangkan Jaminan Sosial Mengentaskan Kemiskinan*, Cetakan

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Miskin diartikan tidak berharta benda; serba kekurangan (berpenghasilan rendah)¹⁶ , sementara *Fakir* mempunyai arti: Orang yang sangat berkekurangan; orang yang sangat miskin; orang yang dengan sengaja membuat dirinya menderita kekurangan untuk mencapai kesempurnaan batin.¹⁷

Saat ini terdapat banyak cara pengukuran kemiskinan dengan standar yang berbeda. Ada dua kategori tingkat kemiskinan absolut dan relatif :

1. Kemiskinan Absolut adalah suatu kondisi dimana tingkat pendapatan seseorang tidak cukup untuk memebuhi kebutuhan pokoknya, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.
2. Kemiskinan Rekatif adalah perhitungan kemiskinan berdasarkan proposi distribusi dalam suatu daerah. Kemiskinan jenis ini dikatakan relatif karena lebih berkaitan dengan distribusi pendapatan antar lapisan sosial.

Pengertian yang lebih luas tentang kemiskinan didefinisikan oleh SMERU, bahwa kemiskinan mencakup berbagai dimensi, antara lain:

- 1) Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar seperti pangan, sandang dan papan.
- 2) Ketidakmampuan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya yaitu kesehatan, pendidikan, sanitiasi, air bersih dan transportasi.

pertama,(Yogyakarta:Media Wacana, 2007),hlm.76.

¹⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta:Balai Pustaka, 1999.hlm.660.

¹⁷*Ibid.*,hlm.273.

- 3) Tidak ada jaminan masa depan karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga.¹⁸

Dari kesimpulan di atas pengertian kemiskinan tidak hanya dari beberapa sisi banyak kategori kemiskinan itu sendiri. Di setiap Negara, kota desa ataupun tempat tinggal terdekat pasti memiliki masyarakat yang tergolong miskin dengan beberapa kriteria. Tingkat kemiskinan di setiap daerah berbeda- beda disini peneliti sebagai peneliti akan meneliti kemiskinan di Binjai.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan.

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita per hari. Garis

¹⁸ Wi Prawani Sri Rejeki, *Analisis Penanggulangan kemiskinan melalui implementasi program P2KP di Kota Semarang (studi kasus di kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun, 2000-2003)*, (semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2006),hlm.16.

Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.¹⁹

Cara pengukuran Kemiskinan sbb :

- a. *Head Count Index* (HCI-P0) adalah persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).
- b. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
- c. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin merumuskan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan. sebagai berikut:

dimana:

$$P_a = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_1}{z} \right]^a$$

a=0, 1, 2 z=Garis kemiskinan

y_1 =Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

¹⁹ Sumber dari Badan Pusat Statistik kota Binjai, *Kota Binjai Dalam Angka Binjai Municipality in Figures 202*), (CV. Rilis Grafika : Binjai, 2020), hlm.104.

$(i=1,2,\dots,q)$, z =Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan
 n =Jumlah penduduk

Jika $a=0$, diperoleh Head Count Index (P0), jika $a=1$ diperoleh indeks kedalaman kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) dan jika $a=2$ disebut indeks keparahan kemiskinan (Poverty Severity Index-P2)²⁰

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: Umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak.

Tabel 2.1 Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kota Binjai, 2012 - 2019

²⁰ Sumber dari Badan Pusat Statistik kota Binjai, *Kota Binjai Dalam Angka Binjai Municipality in Figures 2021*, (CV. Rilis Grafika : Binjai, 2020), hlm.105-106.

Poverty Line and Number of Poors in Binjai Municipality, 2012 – 2019

Tahun Year	Garis Kemiskinan Poverty Line (rupiah)	Penduduk Miskin Number of Poor People	
		Jumlah Total	Persentase Percentage
(1)	(2)	(3)	(4)
2012	295 265	17 200	6,72
2013	305 596	17 500	6,75
2014	310 384	16 720	6,38
2015	322 091	18 600	7,03
2016	343 078	17 800	6,67
2017	371 387	18 230	6,75
2018	380 792	16 070	5,88
2019	403.798	15 610	5,66

Sumber/Source : Survei Sosial Ekonomi Nasional/National Socio Economic Survey

Tabel di atas menjelaskan bahwa kemiskinan di Kota Binjai sendiri setiap tahunnya mengalami fluktuasi.

b. Kemiskinan Dalam Pandangan Islam

Kata miskin di dalam al- qur'an biasa disandingkan dengan kata *faqir*. Karena dua istilah ini menjadi kajian khusus dalam melihat tolak ukur miskin di dalam al- qur'an.

Para Ulama dan cendekiawan telah mengedepankan sejumlah analisis mengenai kemiskinan yang di derita anak manusia. Pada satu sisi kemiskinan di kategorikan kepada dua macam “pertama, kemiskinan individual, yaitu kemiskinan yang menimpa individu-individu tertentu dalam sebuah masyarakat mengenai suatu

ukuran kesenjangan di dalam distribusi pendapatan, yang biasanya dikaitkan dengan tingkat rata-rata dari distribusi yang di maksud. Kedua, kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang menimpa masyarakat disebabkan non individual.²¹

Adapun menurut ulama tafsir diantaranya Ibnu Katsir, melalui penafsirannya terhadap Qs. an-Nisa: 4: 36

﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ۝ ٣٦﴾

Artinya : “Dan Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri” (Qs. an-Nisa: 4: 36)²²

Ayat ini menjelaskan bahwa yang bernama miskin itu adalah orang yang tidak memiliki apa-apa, atau yang menurut bahasa seperti ucapan Ibnu Katsir, “Orang miskin itu adalah orang yang terlantar dan terbuang di jalan”. Beliau mengartikan miskin sebagai orang yang tidak memiliki sesuatu yang dapat dibelanjakan.²³ Miskin diartikan juga sebagai orang-orang yang membutuhkan yakni orang yang tidak mendapatkan pihak yang memenuhi *kifayahnya*. Maka Allah menyuruh manusia untuk membantu mereka dengan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhannya dan

²¹ Tom Anwar, *Hakekat Kemiskinan Massa*, (Jakarta:Sinar Harapan, 1983),hlm.76.

²² Departemen Agama RI Al-Qur’an dan Terjemahan, *Alhidayah Tafsir Per kata Tajwid kode Angka*, Kalim kaya ilmu kaya hati, (Banten:2016).hlm.85.

²³Katsir, Ibn. 1998. *Tafsir al-Qur’anil Adzim, juz I, Cet. IV*. Beirut: Muassasah arrayan.hlm.2181.

menghilangkan *kemudaratanya*.²⁴

Ulama berbeda pendapat dalam mengungkapkan definisi miskin dan *faqir* ini, *mufrad: faqir* menunjukkan kepada seseorang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai usaha tetap untuk mencukupi kebutuhannya, seolah-olah ia adalah orang yang sangat menderita karena *kefaqiran* hidupnya. Sementara al-Masakin (*mufrad: miskin*) menunjukkan kepada seseorang yang memiliki harta dan usaha tetapi ia tidak dapat mencukupi keperluan hidupnya, seolah-olah ialah adalah orang yang lemah hidupnya.²⁵

Perbedaan pendapat tentang yang manakah diantara dua kondisi ini yang lebih baik atau lebih buruk dari yang lainnya diwakili oleh kalangan Syafi'i dan kalangan Hanafiyah. Menurut kalangan Syafi'i yang juga diikuti oleh kalangan Hanabilah menyebutkan bahwa *faqir* lebih buruk kondisinya dari miskin. Sementara kalangan Hanafiyah yang juga diikuti oleh kalangan Malikiyah mengatakan sebaliknya.

Al-Quran dan hadis tidak menetapkan angka tertentu lagi pasti sebagai ukuran kemiskinan, termasuk dimanakah diantara keduanya baik itu *faqir* atau miskin yang lebih layak dibantu. Akan tetapi Quraish Shihab menggolongkan kedua golongan ini sebagai orang yang memerlukan bantuan untuk mencukupi kebutuhannya dan layak untuk dibantu.²⁶

²⁴Katsir, Ibn. 1998. *Tafsir al-Qur'anil Adzim, juz I, Cet. IV*. Beirut: Muassasah arrayan.hlm..hlm.645.

²⁵Nata,Abuddin, dkk, *Kajian Tematik Al-Quran tentang Konstruksi Sosial*,(Bandung:Angkasa Raya, 2008). hlm.154.

²⁶Nata,Abuddin, dkk, *Kajian Tematik Al-Quran tentang Konstruksi Sosial*,(Bandung:Angkasa Raya, 2008). hlm.155.

Dalam Konteks Indonesia, Salah satu problematika mendasar yang saat ini tengah dihadapi adalah masalah kemiskinan. Menurut data Bank Dunia 1978, dari seluruh penduduk Indonesia yang waktu itu berjumlah 132 juta, 72 juta jiwa dalam keadaan miskin dan 55% dibawah garis kemiskinan. Menurut data statistika dari tahun 1976 hingga 2000, angka kemiskinan di Indonesia berubah-ubah, namun masih tetap tergolong besar. Jumlah penduduk miskin pada tahun 1998 adalah 49,5 juta orang atau 24,2 % dari total penduduk Indonesia yang dirinci dengan 31,9 juta orang berada di pedesaan atau 25,7% dan 17,6 juta orang diperkotaan atau 21,9%. Data yang dibuat terakhir oleh BPS menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin mendekati 50 juta jiwa. Dari jumlah tersebut 32,7 juta jiwa atau 64,4 tinggal dipedesaan.²⁷

Kenyataan ini turut berimbas pada angka pengangguran yang juga sangat tinggi, yaitu sekitar 28 juta jiwa, atau 12,7 persen dari total penduduk.²⁸

Fakta tentang hasil survei di atas menunjukkan kenyataan sosial masyarakat bahwa kemiskinan merupakan masalah sosial yang patut menjadi fokus perhatian banyak kalangan mulai dari ekonom, sosiolog, dan budayawan, tidak terkecuali pendekatan al-Quran yang berupaya untuk memberikan solusi terhadap problem sosial ini. Pembicaraan tentang masalah ini banyak diangkat dalam berbagai kesempatan seminar, diskusi, media masa dan lain sebagainya dengan berupaya

²⁷ Siahaan, N.H.T, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta:Erlangga, 2004),hlm.83-84.

²⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat Sebagai Tiang Utama ekonomi Syariah*, Makalah disampaikan pada acara Seminar Bulanan Masyarakat ekonomi Syariah, (Jakarta : Aula bank Mandiri Tower, 2006).

mengetengahkan tolak ukur atau indikator kemiskinan, sebab-sebab terjadinya kemiskinan serta cara-cara mengatasinya.

Kesimpulannya adalah bahwa pada prinsipnya orang miskin dan orang *faqir* adalah mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai kebalikan dari orang kaya yaitu orang yang memiliki kelebihan harta seukuran satu *nisab* dari kebutuhan pokoknya dan anak-anaknya yang meliputi kebutuhan bidang sandang, pangan, papan, minuman, kendaraan, sarana untuk bekerja dan lain sebagainya.

c. Bentuk- Bentuk Kemiskinan

Dalam upaya mengidentifikasi pengentasan kemiskinan di dalam al-Quran, terlebih dahulu akan dikemukakan 3 penggolongan kemiskinan, sehingga akan diperoleh upaya pengentasan kemiskinan yang berdasarkan dari pembagian kemiskinan ini. Penggolongan kemiskinan yang dimaksud adalah kemiskinan kultural, kemiskinan struktural, dan kemiskinan natural.

a) Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural adalah keadaan miskin yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang melekat dalam kebudayaan masyarakat. Terutama yang menyebabkan terjadinya proses kemiskinan dalam masyarakat itu sendiri, misalnya kecenderungan untuk hidup boros, kurang menghargai waktu, dan kurang minat untuk berprestasi.²⁹

²⁹ Al. Suroyo, dkk, *Agama dan Kepercayaan membawa Pembaruan*. (Jogjakarta: Kanisius, 2006).hlm97.

b) Kemiskinan Natural

Keadaan miskin yang disebabkan oleh faktor-faktor alamiah, baik yang berkaitan dengan sumber daya manusia maupun sumber daya alam, misalnya faktor iklim, kesuburan tanah, dan bencana alam.³⁰

c) Kemiskinan Struktural

Keadaan miskin yang disebabkan oleh faktor-faktor yang berkaitan dengan perbuatan manusia, misalnya penjajahan, pemerintahan yang otoriter dan militeristik, pengelolaan keuangan publik yang sentralistik, merajalelanya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), kebijakan ekonomi yang tidak adil, serta perekonomian dunia yang lebih menguntungkan kelompok Negara tertentu.³¹

d. Solusi Al-Quran dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan

Dari sudut pandang tiga ragam kemiskinan yang meletarbelakangi tumbuhnya kemiskinan di masyarakat di atas maka dapat diidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi timbulnya kemiskinan disebabkan oleh berbagai alasan yang berbeda-beda, dan juga tidak semata-mata disebabkan oleh kaum miskin saja. Sehingga upaya yang ditempuh untuk menjawab solusi al-Quran dalam mengatasi kemiskinan yang paling utama adalah faktor individu, faktor yang paling penting karena semua yang ada dan terjadi adalah berkat motivasi diri sendiri. Memperhatikan akar kata miskin yang disebut di atas sebagai arti diam atau tidak bergerak diperoleh kesan bahwa faktor utama penyebab kemiskinan adalah sikap

³⁰ *Ibid.*, hlm.98.

³¹ *Ibid.*, hlm.99.

berdiam diri, atau tidak dapat bergerak dan berusaha. Tidak berusaha adalah penganiayaan terhadap diri sendiri.

Allah SWT melalui Firman-Nya menegaskan kepada umat manusia untuk tidak bersikap malas, sebaliknya Allah SWT senantiasa memerintahkan hamba-Nya untuk senantiasa bekerja dan berusaha untuk memperoleh rezeki dan anugerah dari-Nya. Di dalam al-Quran ditegaskan:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠

Artinya: “Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung.” QS. Al-Jumuah (62):10³²

Bahkan Al-Quran tidak memberi peluang bagi seseorang untuk menganggur sepanjang saat yang dialami dalam kehidupan dunia ini. Firman Allah SWT:

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ٧

Artinya: “Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan) tetaplah bekerja keras untuk (urusan yang lain)” QS. Al-Insyirah; 94: 7.³³

Menurut Quraish Shihab Kata *faraghta* terambil dari kata *faragha*, yang berarti “kosong setelah sebelumnya penuh”. Kata ini tidak digunakan kecuali untuk menggambarkan kekosongan yang didahului oleh kepenuhan, termasuk keluangan yang didahului oleh kesibukan. Seseorang yang telah memenuhi waktunya dengan pekerjaan, kemudian ia menyelesaikan pekerjaan tersebut, maka waktu

³² Departemen Agama RI Al-Qur’an dan terjemahan, *Alhidayah Tafsir Per kata Tajwid kode Angka*, Kalim kaya ilmu kaya hati, (Banten:2016).hlm.555.

³³ *Ibid.*,hlm.597.

antara selesainya pekerjaan pertama dan dimulainya pekerjaan selanjutnya dinamai *faragha*. Ayat di atas berpesan, “Kalau engkau dalam keuangan sedang sebelumnya engkau telah memenuhi waktumu dengan kerja, maka *fanshab*”. Kata *fanshab* antara lain berarti berat, letih. Pada mulanya ia berarti “menegakkan sesuatu sampai nyata dan mantap”. Anjuran bekerja keras sebagaimana diuraikan di atas merupakan salah satu cara mengatasi kemiskinan yang disebabkan oleh karena malas dan lemah kemauan serta sikap mental yang negatif lainnya. Sikap mental kerja keras ini perlu disuntikkan kepada masyarakat yang lemah kemauannya agar timbul semangat untuk bekerja.³⁴

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ... ۱

Artinya : “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri...”(QS. Al-Ra’d,13:11)³⁵

Jadi kesimpulannya setiap manusia akan miskin jika tidak bekerja dan tidak melakukan kegiatan apa-apa. Dalam hidup di dunia manusia harus melakukan kegiatan untuk mencari uang agar kebutuhan pokok yaitu sandang, pangan dan papan dapat terpenuhi dengan baik. Bekerja akan mendapatkan upah atau gaji dan membuka usaha akan mendapatkan keuntungan berupa rezeki langsung turun dari Allah Swt. Semakin banyak dibantu oleh orang lain jika tidak ada kesadaran diri ingin merubah garis hidup yang lebih baik pasti selamanya keturunannya susah untuk tidak

³⁴ M. Quraish Shihab, *Ibadah dan Kerja*, diambil dari artikel dalam website Pusat Studi al-Quran (PSQ), <http://psq.or.id/artikel/ibadah-dan-kerja>, pada tanggal 21 Oktober 2012.

³⁵ Departemen Agama RI Al-Qur’an dan terjemahan *Alhidayah Tafsir Per kata Tajwid kode Angka*, Kalim kaya ilmu kaya hati, (Banten:2016).hlm.251.

mendapat bantuan sosial karena sedari kecil sudah ditanamkan rasa ingin dibantu dan tidak ingin lebih berusaha ketergantungan tersebut membuat Negara kurang potensial di SDM nya (Sumber Daya Manusia) tidak ada ingin kecapaian yang besar bukan hanya ingin merubah nasib keluar dari lingkaran kemiskinan tetapi ingin menuntaskan kemiskinan di daerahnya sendiri.

3. UMKM

Usaha Mikro adalah usaha informal yang memiliki aset, modal. Omset yang sangat kecil. Ciri lainnya adalah komoditi usahanya sering berganti, tempat usaha kurang tetap, tidak dapat dilayani oleh perbankan, dan umumnya tidak memiliki legalitas usaha.³⁶

a. Pengertian UMKM

Menurut UUD 1945 kemudian dikuatkan melalui TAP MPR NO.XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Selanjutnya dibuatlah pengertian UMKM melalui UU No.9 Tahun 1999 dan karena

³⁶ Euis Amalia , *Keadilan Distributif dalam ekonomi islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009),hlm.41-42.

keadaan perkembangan yang semakin dinamis dirubah ke Undang-Undang No.20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka pengertian UMKM adalah sebagai berikut:

- a) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.
- d) Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta,

usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

- e) Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.³⁷

b. Kriteria UMKM

Menurut Pasal 6 UU No.20 Tahun 2008 tentang kreteria UMKM dalam bentuk permodalan adalah sebagai berikut:

Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

1. memiliki kekayaan bersih paling banyak
2. Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
3. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

1. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

³⁷ Yuli rahmini suci, sekolah tinggi ilmu ekonomi balikpapan ,*perkembangan umkm (usaha mikro kecil dan menengah) di Indonesia* (jurnal ilmiah cano ekonomos vol. 6 no. 1 januari 2017),hlm.52.

2. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

1. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).³⁸

c. Kebijakan Pemerintah

UMKM di Indonesia telah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian di Indonesia. Hal ini dikarenakan UMKM merupakan unit-unit usaha yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan usaha industri berskala besar dan memiliki keunggulan dalam menyerap tenaga kerja lebih banyak dan juga mampu mempercepat proses pemerataan sebagai bagian dari pembangunan. Berdasarkan kenyataan ini sudah selayaknya UMKM dilindungi dengan UU dan peraturan yang terkait dalam kegiatan oprasional dan pengembanganya. Beberapa peraturan telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk melindungi UMKM diantaranya UUD 1945 merupakan pondasi dasar hukum di indonesia Pasal 5 ayat(1), Pasal 20, Pasal 27

³⁸Undang-Undang RI tentang UMKM No.20 Pasal 1 dan Pasal 6 Tahun 2008 <http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/fl56041/node/28029> (diakses 22/1/2017).

ayat (2), Pasal 33, UU No.9 Tahun 1995, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan, Peraturan Presiden No.5 Tahun 2007 mengenai program Kredit Usaha Kecil bagi pembiayaan oprasional UMKM, UU No.20 Tahun 2008 tentang perberdayaan UMKM bagi prekonomian di Indonesia, dan yang terbaru adalah Paket 4 Kebijakan Ekonomi “kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang lebih murah dan luas” bagi UMKM.

Harapan Pemerintah meluncurkan paket kebijakan ini merupakan instrumen dalam menyikapi kebutuhan bagi pengembangan UMKM. Pemerintah menyadari bahwa pertumbuhan kredit perbankan cenderung melambat dalam satu tahun terakhir. Kecenderungan perlambatan penyaluran kredit tentu saja terkait dengan melemahnya pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, untuk mendorong gerak roda ekonomi masyarakat khususnya kepada UMKM, pemerintah memberikan subsidi bunga yang lebih besar bagi KUR.³⁹

Secara kuantitas, UMKM memang unggul, hal ini didasarkan pada fakta bahwa sebagian besar usaha di Indonesia (lebih dari 99 %) berbentuk usaha skala kecil dan

³⁹ Yuli rahmini suci, sekolah tinggi ilmu ekonomi Balikpapan ,*perkembangan umkm (usaha mikro kecil dan menengah) di Indonesia* (jurnal ilmiah cano ekonomos vol. 6 no. 1 januari 2017),hlm.52.

menengah (UMKM). Namun secara jumlah omset dan aset, apabila keseluruhan omset dan aset UMKM di Indonesia digabungkan, belum tentu jumlahnya dapat menyaingi satu perusahaan berskala nasional. Data-data tersebut menunjukkan bahwa UMKM berada di sebagian besar sektor usaha yang ada di Indonesia.

Apabila mau dicermati lebih jauh, pengembangan sektor swasta, khususnya UMKM, perlu untuk dilakukan mengingat sektor ini memiliki potensi untuk menjaga kestabilan perekonomian, peningkatan tenaga kerja, meningkatkan PDB, mengembangkan dunia usaha, dan penambahan APBN dan APBD melalui perpajakan. UMKM adalah usaha yang penting, hanya untuk orang-orang tidak berpendidikan. Justru mungkin inilah saat bagi masyarakat yang sudah menyadari begitu dahsyatnya ketangguhan UMKM, untuk mulai memberikan perhatian yang lebih serius di dalam sektor ini. Bila melihat UMKM yang ada di Negara lain, salah satunya adalah Korea Selatan yang berhasil mengembangkan UKM. Negara ini mendefinisikan UKM sebagai usaha yang jumlah tenaganya di bawah 300 orang dan jumlah assetnya kurang dari US \$ 60 juta. Saat ini keadaan UMKM di Indonesia semakin menurun, ini dikarenakan kesalahan pengurusan dan kurangnya perhatian pemerintah. Alasannya, pelaksanaan program pemberdayaan UMKM berikut anggarannya yang sangat melimpah tiap tahun dinilai tidak efektif. Ini terbukti dari kenyataan bahwa sektor UMKM yang mampu menyediakan 99,46% lapangan pekerjaan baru, namun kontribusinya baru 43,42% dari seluruh nilai transaksi perekonomian Indonesia setiap tahunnya. Peran UMKM nampak belum begitu dirasakan karena kurangnya kekuatan bersaing dengan produk-produk luar negeri,

dan juga masalah klasik yaitu permodalan. Keadaan ini harus dilihat sebagai masalah yang harus dipecahkan bersama. Karena tidak ingin selamanya terpuruk di dalam krisis yang sudah lebih dari 5 tahun melanda negeri ini.

Secara teori ekonomi pembangunan, laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang didukung oleh pertumbuhan sektor industri akan mendorong meningkatnya permintaan terhadap tenaga kerja yang pada gilirannya akan memperluas kesempatan kerja. Meningkatnya kesempatan kerja baru akan mendorong tingkat pendapatan masyarakat, sehingga daya beli masyarakat akan meningkat. Selanjutnya, perluasan kesempatan kerja berarti berkurangnya pengangguran dan peningkatan pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan tingkat kemiskinan.⁴⁰

Seseorang disebut miskin karena tidak punya akses untuk memenuhi kebutuhannya. Akses yang menjadi hak setiap orang ditentukan oleh “nilai diri”. Bagi sebagian orang, nilai diri yang dimiliki sebatas tenaga kerja. Oleh karena itu, kemiskinan dan kelaparan tidak dapat di atasi dengan hanya sekedar memperbesar produksi (laju pertumbuhan ekonomi) saja. Dengan demikian, jika pemberantasan kemiskinan adalah motif utama setiap kebijakan pembangunan, maka upaya penyediaan lapangan kerja serta peningkatan penghasilan orang miskin adalah tujuan terpenting semua kegiatan, dan peran usaha kecil termasuk industri kecil kerajinan (UMKM) dapat diyakini sebagai pendukung utama perekonomian rakyat dalam motif

⁴⁰ Yuli rahmini suci, sekolah tinggi ilmu ekonomi balikpapan ,*perkembangan umkm (usaha mikro kecil dan menengah) di Indonesia* (jurnal ilmiah cano ekonomos vol. 6 no. 1 januari 2017),hlm.52.

ini. Oleh karena itu, masalah memanusiakan manusia, pencapaian kesejahteraan sosial ekonomi, dan nasionalisme pengamanan masa depan orang miskin harus menjadi fokus utama setiap kebijakan pembangunan di Indonesia pada saat ini dan kedepan. Selanjutnya, kesempatan yang sama harus dapat diberikan melalui kebijakan dan regulasi serta iklim usaha yang sehat dalam persaingan antar UMKM dan usaha besar di Indonesia, karena pemberantasan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja dirasakan akan lebih berhasil daripada penyediaan *output*. Dengan kata lain, fungsi dan peran UMKM dapat diakui telah terbukti tahan banting dan lebih kebal terhadap krisis, serta mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar.

Dengan demikian, peran UMKM dapat dijadikan sebagai ujung tombak penanggulangan kemiskinan dan pengangguran sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an berikut :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠

Artinya : “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung” (Q.S.Al-Jumu'ah/62:10).⁴¹

Allah juga berfirman,

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ١٩٨

Artinya : “Tidak ada dosa bagimu mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Rabb-mu.” (Q.S. Al-Baqarah/2: 198).⁴²

⁴¹ Departemen Agama RI Al-Qur'an dan terjemahan, *Alhidayah Tafsir Per kata Tajwid kode Angka*, Kalim kaya ilmu kaya hati, (Banten:2016).hlm.555.

⁴² *Ibid.*,hlm.32.

Allah juga berfirman,

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ ٢٩

Artinya : “kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu” (Q.S. An-Nisa’/4: 29).⁴³

Allah juga berfirman,

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ۚ ٢٧٥

Artinya : “Dan Allah menghalalkan jual beli.” (Q.S. Al-Baqarah/2: 275).⁴⁴

Jadi kesimpulannya jika UMKM di Indonesia lebih ditingkatkan, Indonesia pasti akan lebih baik perekonomiannya. Mengapa? Karena pendapatan perkapita seluruh keluarga juga akan meningkat. Jika masyarakat banyak membuka sebuah usaha kemudian memberi lapangan pekerjaan yang baru. Usaha yang paling mendasar adalah usaha kecil jika hampir rata setiap keluarga mempunyai usaha sampingan ataupun tetap dengan usaha kecil ataupun sedang pasti keadaan ekonomi dalam keluarga tersebut akan membaik. Kemiskinan semakin lama akan berkurang dengan perlahan. Karena di Indonesia sendiri masalah kemiskinan sudah merupakan masalah yang sangat umum dan besar bagi Negara ini. Sudah banyak cara dan solusi tetapi belum semaksimal yang seperti diharapkan.

Menurut peneliti sebagai penulis tema UMKM sendiri menjadi topik yang sangat pas jika ingin teliti pada saat keadaan sekarang. Karena pada dasarnya UMKM dari keadaan dulu sampai dengan sekarang menjadi hal yang menguntungkan jika dilakukan karena itu, jika usaha tersebut menjadi jalan keluar untuk masyarakat yang merasa kurang ataupun dalam keadaan miskin. Di zaman sekarang kebanyakan warga

⁴³ *Ibid.*, hlm.84.

⁴⁴ Departemen Agama RI Al-Qur’an dan terjemahan, *Alhidayah Tafsir Per kata Tajwid kode Angka*, Kalim kaya ilmu kaya hati, (Banten:2016).hlm.48.

yang ekonomi menengah keatas gencar membuka usaha dari jabatan sipil Negara sampai yang berkecimpung di dunia hiburan sekalipun. Bagaimana dengan rakyat kecil yang hanya menerima dan menerima saja.

Dalam Konteks bantuan sosial yang diberikan pemerintah sudah seharusnya KPM (Keluarga Penerima Manfaat) berpikir bagaimana cara menuntaskan kemiskinan pada diri sendiri dengan memanfaatkan dan mengolah potensi dari bantuan tersebut. sehingga ia mampu keluar dari lingkaran kemiskinan.

B. Penelitian Yang Relevan

Dari telaah pustaka yang dilakukan, ada beberapa banyak hasil penelitian yang relevan dengan variabel penelitian ini, namun peneliti hanya ,mengambil beberapa hasil penelitian tersebut, diantaranya :

1. Dewi Citra Larasati Mahasiswi Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang Program Studi Administrasi Negara, FISIP angkatan 2018, yang berjudul “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu”.

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan fokus penelitian yaitu: Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan yang meliputi: Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Faktorfaktor yang mempengaruhi Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan yang meliputi faktor pendukung dan faktor

penghambat. Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah melalui kata-kata dan tindakan, sumber tertulis, foto dan data statistik.⁴⁵

2. Edi Suharto, Mahasiswa Program Pendidikan Pasca Sarjana Spesialis-1 Pekerjaan Sosial STKS Bandung Angkatan 2012, yang berjudul “Program Keluarga Harapan (PKH): Memotong Mata Rantai Kemiskinan Anak Bangsa”.

Metode yang digunakan berdasarkan rangkaian pengamatan langsung dan dikombinasikan dengan desk review dari Unit Pelaksana PKH ditingkat pusat dan daerah, serta serangkaian FGD dengan para pendamping/fasilitator di lapangan, tenaga ahli PKH, koordinator wilayah, koordinator regional, dan RTSM penerima manfaat.⁴⁶

3. Baiq Reinelda Tri Yunarni.dkk, Mahasiswa Prodi Administrasi Bisnis, Universitas Muhammadiyah Mataram Indonesia 2019, yang berjudul “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengurangi Angka Kemiskinan (Studi: Desa Daha Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu)”

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi Program Keluarga Harapan di Desa Daha sudah dijalankan dengan baik dan efektif, dilihat dari jumlah penduduk miskin setiap tahunnya semakin berkurang dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat. Program keluarga harapan dijalankan

⁴⁵ Liahati , Dewi Citra Larasati, *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu*, 2018.

⁴⁶ Djuni Thamrin, Edi Suharto, *Program Keluarga Harapan (PKH): Memotong Mata Rantai Kemiskinan Anak Bangsa*, 2012.

sudah sesuai dengan tugas dan kewenangan SOP yang digunakan pada pedoman dari pusat dan Kabupaten Dompu. Sosialisasi awal sudah dilakukan dengan baik, pemuktahiran data selalu dilakukan pendamping setiap pertemuan, verifikasi pendidikan dan kesehatan sudah dijalankan dengan baik, hanya saja fasilitas untuk pendamping PKH masih kurang

Persamaan pada penelitian di atas dengan yang akan diteliti adalah sama-sama tentang PKH memutuskan kemiskinan tetapi perbedaannya peneliti lebih fokus dengan pembuatan UMKM untuk mengentaskan kemiskinan pada KPM PKH dan Lokasi Kota dan tempat Penelitian

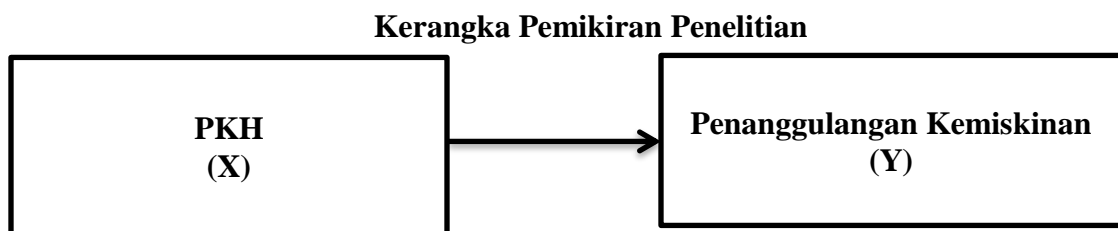
C. Kerangka Berfikir

Kemiskinan menjadi salah satu masalah terbesar Negara berkembang salah satunya Indonesia. Banyak cara-cara mengurangi tingkat kemiskinan dan penanggulangannya yang dilakukan oleh pemerintah dari tahun ke tahun hingga sekarang. Hal yang paling banyak dan umum diketahui oleh masyarakat pemerintah tidak lepas tangan dalam menghadapi kemiskinan ini. Program yang tiap tahun dibuat selalu ada bahan revisi dan evaluasi salah satunya PKH.

PKH adalah singkatan dari Program Keluarga Harapan dimana kebijakan program pemerintah tersebut yang tujuannya adalah mengurangi kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu didalam PKH tersebut banyak program yang bukan hanya mengatasi kemiskinan dengan memberikan BLT (Bantuan Langsung Tunai) ataupun dengan Non Tunai yang berupa uang kemudian dibelikan menjadi sembako. Segala Upaya dari Kesehatan, Pendidikan Hingga Orang

tua yang sudah lansia juga diperhatikan.

Penerima PKH yang disebut KPM tidak semua bisa dikatakan menanggulangi kemiskinan mengapa? Sebenarnya tujuan utamanya mengurangi kemiskinan otomatis masyarakat yang kurang mampu yang mendapat PKH tidak terus larut dalam bantuan tersebut. KPM lama harus memanfaatkan bantuan dari pemerintah semaksimal mungkin agar untuk kedepannya dapat tergantikan oleh KPM yang baru. karena sistem kerja PKH itu dari pusat yang memilih siapa saja yang menurut pusat berhak menerima. Sering timbul pertanyaan baru di kalangan masyarakat? Mengapa dua orang yang sama-sama miskin tetapi yang dapat hanya yang tetangganya saja satu rumah tangga yang lainnya tidak butuh kategori dan spesifikasi yang jelas ada syaratnya yang menilai otomatis dari system. Jika anggota PKH minimal hanya memanfaatkan bantuannya selama 3 tahun saja paling lama kemungkinan bisa untuk menanggulangi kemiskinan dengan cara apa? Buka lah sebuah usaha dari usaha yang paling kecil saja. Karena usaha sekecil apapun pasti mendapatkan keuntungan. Jika dilakukan rutin dan dengan manajemen sederhana yang baik akan memberikan keuntungan yang efisien.



Gambar 2.1

X = PKH

Y = Penanggulangan Kemiskinan

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis sebagai istilah teknis penelitian merupakan kata bentukan yang terdiri atas dua kata dasar yaitu “hipo atau hupo” yang berarti lemah, rendah, atau sementara dan “tesis” atau tesa yang berarti teori atau jawaban. Hipotesis berarti jawaban sementara, karena hipotesis merupakan jawaban yang mengandung kebenaran tetapi belum teruji secara empiris⁴⁷

Berdasarkan teori di atas, maka penulis membuat hipotesis sebagai berikut :

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap variabel Proram Keluarga Harapan (PKH) terhadap penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Cengkeh Turi Binjai Utara.

Ha : Terdapat Pengaruh yang Signifikan terhadap variabel Proram Keluarga Harapan (PKH) terhadap penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Cengkeh Turi Binjai Utara.

⁴⁷ Alo Liliwari, *Metode Penelitian Kuantitatif Ekonomi, sosiologi, Komunikasi, Administrasi, Pertanian dan lainnya*, (Jakarta, Kencana: 2019), hlm.85.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Sosial Kota Binjai Bagian PKH (Program Keluarga Harapan), yang berlokasi di Jl. Gatot Subroto No. 83 ,Kelurahan Limau Mungkur, Kec Binjai Barat Kota Binjai. Adapun alasan atau pertimbangan penulis memilih Kantor Dinas Sosial Kota Binjai Bagian PKH sebagai tempat penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Kemudahan dalam mengambil dan mengakses data dari lembaga tersebut, karena penulis merupakan warga Kota Binjai.
- b. Menurut Penulis PKH Kota Binjai merupakan salah satu program pemerintah yang cukup baik dalam pemberian bantuan.
- c. PKH kota Binjai merupakan salah satu program yang melakukan pemberdayaan kepada masyarakat miskin melalui program bantuan pemerintah yang telah disesuaikan dan ditetapkan.

Selanjutnya dalam mendata dan menyalurkan Bantuan tersebut, PKH Kota Binjai melakukannya pada 5 Kecamatan di Kota Binjai, yaitu Kecamatan Binjai Kota, Binjai Barat, Binjai Timur, Binjai Selatan dan Binjai Utara. Adapun Responden dalam penelitian adalah para KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang menerima Bantuan tersebut.

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Jika dari sifatnya, penelitian ini bersifat analisis deskriptif analisis, yang artinya bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang sedang berlaku, di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat dan menginterpretasikan kondisi- kondisi sekarang ini yang sedang terjadi.⁴⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *kausal- kuantitatif, kausal* yaitu menjelaskan pengaruh antara variabel independen yaitu PKH, terhadap variabel dependen yaitu pengurangan tingkat kemiskinan, *kuantitatif* karena ada data penelitian ini menggunakan angka-angka analisis menggunakan statistik.

3. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, maka dalam penelitian ini membutuhkan beberapa sumber yang mendukung. Maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data Primer, yaitu data yang di dapat dengan cara menyebarkan angket/kuisisioner kepada para responden sampel yang telah terpilih dan juga digunakan.

⁴⁸Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.21.

- 2) Data Skunder, yaitu dengan cara membaca/mempelajari buku-buku yang memuat teori serta berhubungan langsung dengan permasalahan dan membandingkan dengan data dan fakta dengan keadaan yang terjadi di lapangan.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah semua item terpilih untuk distudikan. Para ststisti menggunakan terminologi populasi untuk menunjuk pada keseluruhan satuan pengamatan yang disebut juga unit dari satu penelitian. Dalam kasus *red wine*, yang menjadi populasi adalah semua merk wine, dan dalam kasus pengunduran diri secara sukarela dalam lima tahun terakhir.⁴⁹

Menurut Sugyiono, populasi adalah wilayah generalis yang terdiri atas objek maupun subjek dimana objek atau subjek tersebut mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk kemudian dipelajari dan dapat ditarik kesimpulan.⁵⁰

Dalam Penelitian ini populasi yang dimaksudkan adalah seluruh warga Penerima PKH di Kota Binjai Kec Binjai Utara Kelurahan Cengkeh Turi yang

⁴⁹ Alo Liliweri, *Metode Penelitian Kuantitatif Ekonomi, sosiologi, Komunikasi, Administrasi, Pertanian dan lainnya*, (Jakarta, Kencana: 2019), hlm.115.

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : ALFABETA, 2013), hlm.64.

berjumlah populasi sebanyak 355 orang.

Diantara jumlah populasi tersebut tidak semua masuk kedalam kategori sebuah sampel karena tidak semua PKH memiliki sebuah UMKM dan bergraduasi mandiri (keluar dari PKH dengan sendiri karena sudah merasa perekonomiannya membaik dan sudah tidak miskin).

Diantara 355 KPM PKH 30 KPM yang sudah graduasi mandiri yang memiliki sebuah Usaha ia sudah mampu atau meningkat taraf ekonominya selama di PKH dan mengundurkan diri dari PKH secara sukarela.⁵¹ jadi jumlah sampel yang akan diteliti berjumlah 30 responden.

b. Sampel

Statisti menggunakan kata sampel yang berasal dari kata dalam bahasa inggris “sample” yang diindonesiakan “sampel” dan disamaartikan sebagai contoh, yaitu bagian yang diambil dari populasi.⁵²

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Tujuannya adalah untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis data. Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sampel adalah sebagian atau mewakili populasi yang diteliti. Apabila subjeknya kurang lebih dari 100, lebih baik diambil semuanya, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Jika jumlahnya lebih dari 100 dapat diambil 10% - 15% atau

⁵¹ Sumber Data dari Bapak Saiful Khalifah sebagai Koordinator PKH Kota Binjai. Wawancara pada tanggal 08 Juli 2020 Jam 12:29 WIB di Kantor Dinas Sosial Bagian PKH.

⁵² Alo Liliweri, *Metode Penelitian Kuantitatif Ekonomi, sosiologi, Komunikasi, Administrasi, Pertanian dan lainnya*, (Jakarta, Kencana: 2019), hlm.115.

20% atau lebih.⁵³

Pengambilan sampel penelitian adalah sampel *non profitabilitas* yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi kesempatan atau peluang bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Sama seperti penelitian ini dalam mengambil sampel untuk data penelitian menggunakan sampel yang sesuai syarat karena pada judul yang menjadi populasi adalah semua yang mendapat PKH sedangkan tidak semua PKH sudah tertanggulangi kemiskinannya dengan pembuatan UMKM itu sendiri. Jadi data sampel yang akan dipakai adalah yang memenuhi syarat yaitu adalah seorang keluarga penerima PKH dan sudah mengeluarkan diri (Graduasi Mandiri karena telah membuat UMKM).

Teknik Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sampling Kuota yaitu teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah (kuota) yang diinginkan.⁵⁴

Jadi sampel yang akan diteliti adalah sebanyak 12 KPM PKH yang sudah bergraduasi mandiri dari PKH dan 18 orang anggota PKH yang membuka usaha.

D. Instrumen Penelitian

Variabel Penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

⁵³ Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm.112.

⁵⁴Sugiyono, *statistika untuk penelitian* , (Bandung : ALFABETA, 2013),hlm.67.

dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam variabel penelitian dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

1. *Variabel Independen*, yaitu variabel bebas yang tidak terikat yang bersifat mempengaruhi. Dalam penelitian ini yang dimaksud variabel independen adalah PKH (X).
2. *Variabel Dependent*, yaitu variabel terikat yang bersifat dipengaruhi atau menjadi akibat. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependent adalah penanggulangan kemiskinan (Y).

a. Variabel X adalah Program PKH

a) Definisi Konseptual

Dengan Potensi yang sangat besar, PKH merupakan salah satu instrumen nasional yang berpotensi besar untuk turut membantu pencapaian sasaran pembangunan nasional khususnya dalam menentaskan kemiskinan.

b) Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah unsur-unsur dari sebuah penelitian yang menjelaskan bagaimana mengukur suatu variabel. Operasional tersebut mampu menunjukkan indikator- indikator yang menjadi pendukung dari variabel- variabel yang akan dianalisa. Variabel dalam penelitian ini yang perlu dioperasionalkan adalah : PKH yang beberapa dimensi yang mencakup nilai- nilai dalam kelayakan pemberi pembiayaan yang menunjukkan beberapa indikator-indikator tersebut antara lain :

1. Penyaluran PKH
2. Pengelolaan PKH
3. Pendayagunaan PKH
4. Penanggulangan Kemiskinan

b. Kisi- Kisi Instrumen

Kisi-kisi instrumen penelitian pada variabel dependen Program PKH dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3. Kisi-Kisi Instrumen PKH

No	Instrumen	Indikator	Jumlah Soal	Nomor Soal
1	PKH (X) (Aprilia Saraswati, Analisis Pengaruh Program PKH Terhadap pengentasan Kemiskinan dalam perspektif ekonomi islam, Jurusan ekonomi islam, UIN Raden Intan Lampung Tahun 2018).	Penyaluran PKH	2	1, 2
		Pengelolaan PKH	2	3, 4
		Pendayagunaan PKH	2	5, 6
		Sosialisasi PKH	2	7, 8
		Peran PKH	2	9,10
	Jumlah Soal		10 Butir Soal	

b. Variabel Y adalah Penanggulan Kemiskinan

a) Definisi Konseptual

Penanggulan kemiskinan sebenarnya adalah lepas dari kemiskinan itu sendiri hal yang sangat membantu adalah modal dari pemerintah tetapi, kemampuan usaha sendiri dalam mencari solusi untuk diri sendiri adalah yang terbaik dengan membuat sebuah usaha sebagai peran pemilik.

Seperti kata Bob Marlie “sekecil-kecilnya usaha pemilik usaha adalah bosnya”. Pendapatan yang sedikit tetapi lancar dan terus-menerus secara berkesinambungan menghasilkan harapan yang besar dan hasil yang memuaskan pula. Seperti kata pepatah “ sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit” yakinlah sebuah usaha akan menurunkan rezekinya secara langsung.

b) Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah unsur-unsur dari sebuah penelitian yang menjelaskan bagaimana mengukur suatu variabel. Operasional tersebut mampu menunjukkan indikator-indikator yang menjadi pendukung dari variabel-variabel yang akan dianalisa. Variabel dalam penelitian ini yang perlu dioperasionalkan adalah : Kemiskinan dan UMKM yang beberapa dimensi yang mencakup nilai-nilai dalam kelayakan pemberi pembiayaan yang menunjukkan beberapa indikator-indikator tersebut antara lain :

1. Sosialisai penanggulangan kemiskinan dengan pembuatan UMKM
2. Strategi awal dalam pembukaan UMKM
3. Pengelolaan dan Pengembangan UMKM
4. Pengentasan Kemiskinan

b. Kisi- Kisi Instrumen

Kisi-kisi instrumen penelitian pada variabel dependen Penanggulan Kemiskinan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3. Kisi-Kisi Instrumen PKH

No	Instrumen	Indikator	Jumlah	Nomor
----	-----------	-----------	--------	-------

			Soal	Soal
1	Kemiskinan (Y) (Aprilia Saraswati, Analisis Pengaruh Program PKH Terhadap pengentasan Kemiskinan dalam perspektif ekonomi islam, Jurusan ekonomi islam, UIN Raden Intan Lampung Tahun 2018).	Sosialisai penanggulangan kemiskinan dengan pembuatan UMKM	2	1,2
		Strategi awal dalam pembukaan UMKM	2	3, 4
		PKH dalam Pengelolaan dan Pengembangan UMKM	2	5, 6
		Pengentasan Kemiskinan	2	7, 8
		Tujuan utama PKH dalam Penanggulangan Kemiskinan	2	9,10
Jumlah Soal			10	Butir Soal

E. Teknik Analisis Data

a. Uji Validitas

Uji validitas adalah alat ukur instrument- instrumen yang digunakan dalam penelitian, dimana berfungsi mengetahui valid atau tidaknya instrument-instrumen yang digunakan. Pengujian ini dilakukan dengan pengumpulan skor, kemudian skor tersebut diolah dengan Coefficient correlation Person dalam SPSS 22 *Statistics For windows* dengan ketentuan jika nilai signifikasi (P value) $\leq 0,05$ maka tidak terjadi hubungan yang signifikan. Sedangkan apabila nilai signifikasi (P value) $\geq 0,05$ maka terjadi hubungan yang signifikan.⁵⁵

b. Uji Reliabilitas

Untuk dapat mengetahui kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab butir-butir berkaitan dengan konstruk pertanyaan yang disusun dalam

⁵⁵ Saifudin Azhar, *Metode Penelitian, cet. Ke-2*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar Officent, 1999).hlm.98.

suatu bentuk kuisioner maka sangat diperlukan uji reliabilitas (kehandalan). Reliabilitas suatu kontruk variabel dikatakan baik jika memiliki nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar ($>$) 0,60.

c. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah untuk menguji data variabel X dan Variabel Y pada persamaan regresi yang dihasilkan, yaitu berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Persamaan regresi dikatakan baik jika memiliki data. Variabel bebas dan variabel terikat mendekati normal sekali. Dalam uji normalitas ini penulis menggunakan *kolmogrov-smirno* yang menggunakan taraf signifikansi $\geq 5\%$ ($p=0,05$), pengujian ini menggunakan bantuan SPSS 22 *Statistics for windows*.

d. Uji Regresi Linear Sederhana

Uji regresi linear sederhana adalah pengujian terhadap data yang mana terdiri dari dua variabel, satu variabel independen dan satu variabel dependen, dimana variabel tersebut bersifat kausal (berpengaruh). Persamaan garis linear sederhana adalah:⁵⁶

$$Y = a + Bx + \zeta$$

Dimana :

Y = Subjek dalam variabel dependen yang diprediksi

A = harga Y bila X = 0 (harga konstanta)

⁵⁶ Mustafa Edwin, *Proses penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Ekonomi Universitas Indonesia, 2006), hlm.127.

β = Angka arah koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan atau penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen. Bila b (+) maka naik, dan b (-) maka terjadi penurunan.

X = Subyek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu.

ξ = penyimpangan antara titikobservasi dengan garis regresi yang dibuat, atau bisa disebut *error*.

e. Uji Korelasi (Uji T)

Uji korelasi T digunakan untuk mengetahui kemampuan masing-masing variabel indeoenden secara individu (*partial*) dalam menjelaskan perilaku dependen. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikasi 0,05. Penolakan dan penerimaan hipotesis dilakukan dengan kriteria adalah jika nilai signifikansi kurang atau sama dengan 1 % dan 5 % maka hipotesis diterima yang berarti secara parsial variabel zakat dan pengurangan tingkat kemiskinan. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut :

$$t = r \frac{\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan :

t = Probabilitas

r = Koefisien korelasi spearman

n = Banyaknya subjek atau responden

H_a : Terdapat pengaruh yang signifikan PKH terhadap penanggulangan kemiskinan dengan pembuatan UMKM.

Ho : Tidak Terdapat pengaruh yang signifikan PKH terhadap penanggulangan kemiskinan dengan pembuatan UMKM.

Kaidah pengambilan keputusan

Jika $\text{sig} \geq \text{sig } 0,05$ Ha diterima

Jika $\text{sig} \leq \text{sig } 0,05$ Ho ditolak

f. Koefisien Product Moment

Uji Pearson Product Moment adalah salah satu dari beberapa jenis uji korelasi yang digunakan untuk mengetahui derajat keeratan hubungan 2 variabel yang berskala interval atau rasio, di mana dengan uji ini akan mengembalikan nilai koefisien korelasi yang nilainya berkisar antara -1, 0 dan 1. Nilai -1 artinya terdapat korelasi negatif yang sempurna, 0 artinya tidak ada korelasi dan nilai 1 berarti ada korelasi positif yang sempurna.

Rentang dari koefisien korelasi yang berkisar antara -1, 0 dan 1 tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila semakin mendekati nilai 1 atau -1 maka hubungan makin erat, sedangkan jika semakin mendekati 0 maka hubungan semakin lemah.

g. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Dalam Uji regresi dianalisis pula besarnya koefisien determinasi (R^2). Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur dan mengetahui persentase pengaruh variabel independen terhadap perubahan variabel independen terhadap perubahan variabel dependen. Jika nilai mendekati 1 maka dikatakan semakin kuat kemampuan variabel bebas dalam model regresi tersebut guna menerangkan variabel

terikatnya. Sebaliknya jika mendekati 0 maka semakin lemah variabel bebas menerangkan variasi variabel terikat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Program Keluarga Harapan (PKH)

1. Sejarah Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) berlokasi di dalam kantor Dinas Sosial Kota Binjai yang berlokasi di Jl. Jend.Gatot Subroto N0.83, Kelurahan Limau Mungkur Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara.

Produk-Produk dalam Dinas Sosial :

Produk-produk atau bantuan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Binjai kepada masyarakat, yaitu:

1. PKH (Program Keluarga Harapan)

PKH (Program Keluarga Harapan) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin lalu diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial baru ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH.

Bantuan PKH berupa uang yang disalurkan secara 4 tahap dalam waktu 1 tahun. Pencairan dana dilakukan melalui agen/outlet dan mesin ATM.

Kartu yang digunakan untuk penarikan bantuan PKH adalah Kartu Keluarga Sejahtera (Baru / Kartu Generasi Ketiga) yang berfungsi

sebagai kartu debit/ATM.

Indeks bansos program keluarga harapan:

1. PKH regular setiap keluarga Rp 550.000/tahun
2. PKH akses setiap keluarga Rp 1.000.000/tahun
3. Ibu hamil Rp 2.400.000/tahun
4. Anak usia dini 0 – 6 tahun Rp. 2.400.000/tahun
5. Penyandang disabilitas berat Rp 2.400.000/tahun
6. Lansia 60 tahun ke atas Rp 2.400.000/tahun

2. BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)

BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) merupakan bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat tidak dalam bentuk uang tunai melainkan dalam bentuk bahan pangan pokok (sembako) yaitu beras sebanyak 5 kg dan telur 35 butir.

Prinsip bantuan PBNT semua penerima bantuan akan memiliki rekening tabungan bank, semua bantuan akan masuk kedalam rekening tersebut, lalu bantuan tersebut dapat dicairkan/ditukarkan dengan sembako yang telah disediakan pemerintah melalui agen/e-warong secara elektronik yang telah ditunjuk oleh Dinas Sosial.

3. KIS (Kartu Indonesia Sehat)

Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah kartu yang memiliki fungsi untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis. Penggunaannya sendiri

dapat menggunakan fungsi KIS ini di setiap fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjut. KIS hanya diperuntukan bagi seseorang yang di mana kondisinya ekonominya sangat lemah.

4. KIP (Kartu Indonesia Pintar)

Kartu Indonesia Pintar (KIP) sendiri merupakan kartu yang ditujukan bagi keluarga miskin dan rentan miskin yang ingin menyekolahkan anaknya yang berusia 7-18 tahun secara gratis. Mereka yang mendapat KIP ini akan diberikan dana tunai dari pemerintah secara reguler yang tersimpan dalam fungsi kartu KIP untuk bersekolah secara gratis tanpa biaya.

Dana yang diberikan kepada masyarakat, yaitu:

1. SD/Sederajat Rp 900.000/tahun
2. SMP/Sederajat Rp 1.500.000/tahun
3. SMA/Sederajat Rp 2.000.000/tahun

5. Bedah Rumah

Untuk membenahi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang kondisinya kurang layak huni, Dinas Sosial Kota Binjai melakukan program yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ([KemenPUPR](#)) yaitu program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau lebih dikenal sebagai [Program Bedah Rumah](#).

Ada tujuh kriteria yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang

menerima BSPS, di antaranya ketidaklayakan rumah yakni luas lantai kurang dari 72 m², atap rumah terbuat dari daun atau lainnya, dinding rumah terbuat dari bambu atau jenis lainnya, lantai tanah, tidak mempunyai akses ke sanitasi yang layak, sumber penerangan bukan listrik, dan tidak ada akses ke air minum layak.

Syarat Mendapat Bedah Rumah Kriteria penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2016:

1. WNI yang sudah berkeluarga;
2. Memiliki atau menguasai tanah
 - a. Tanah yang dikuasai secara fisik dan memiliki legalitas (sertifikat/surat keterangan
 - b. Tidak dalam sengketa
 - c. Lokasi tanah sesuai tata ruang wilayah;
3. Belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni;
4. Belum pernah memperoleh BSPS;
5. Berpenghasilan paling banyak senilai UMP setempat;
6. Diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun atau meningkatkan kualitas rumahnya;
7. Bersedia membuat pernyataan.

Dari Produk-produk bantuan diatas penulis meneliti pada bantuan PKH (Program

Keluarga Harapan).

Kota Binjai adalah salah satu kota yang mengikuti dan berperan serta dalam program pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan, salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Di Kota Binjai, PKH mulai ada sejak tahun 2014 yang memiliki jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH sebanyak 1.672 Keluarga.

Kini, tahun 2019 jumlah warga kurang mampu yang dilayani oleh Pemerintah melalui PKH adalah sebanyak 6.313 keluarga tersebar di 5 Kecamatan dengan total nilai bantuan mencapai Rp 22.642.450.000,- yang dikawal oleh 19 orang Pendamping, 1 orang administrator database, 1 orang Supervisor dan 1 orang koordinator kota.⁵⁷

Program Keluarga Harapan di tahun 2019 banyak sekali melakukan perubahan baik dari tingkat pusat maupun daerah. Pada dasarnya perubahan ini dimaksudkan untuk peningkatan kualitas pelayanan Pemerintah Pusat dan Kota Binjai kepada masyarakat miskin. Disamping itu, hampir seluruh pendamping sosial PKH sudah mendapatkan diklat FDS/ P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga) di BBPPKS (Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial) Regional I Sumatera di Padang dalam rangka menambah kapasitas pendampingan ibu-ibu kpm dalam melakukan kegiatannya sehari-hari dan pengentasan kemiskinan relatif lebih mudah dicapai.

Kebijakan PKH tahun 2019 berubah signifikan pada dasarnya untuk peningkatan

⁵⁷ Sumber data dari Laporan Tahunan 2019 Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Binjai Oleh Koordinator Kota PKH - Kota Binjai Syaiful Khalifah (Ipoel) pada tanggal 31 Desember 2019.

kualitas dan kuantitas pelayanan PKH terhadap masyarakat Indonesia terutama para KPM PKH. Beberapa hal mendasar yang berubah dalam PKH adalah sebagai berikut;

1. Perubahan Tentang Kategori PKH Sesuai dengan surat Kementerian Sosial RI nomor : 2354/3.4/BS.02.01/11/2019 bahwa dalam rangka persiapan penyaluran bantuan sosial PKH tahun 2020 perhitungan kategori PKH untuk bantuan menjadi : a. Lansia yang semula usia mulai ≥ 60 tahun berubah menjadi mulai usia ≥ 70 tahun b. Perhitungan bantuan sosial untuk kategori Lansia di atas sebanyak-banyaknya 1 (satu) Lansia didalam Keluarga PKH c. Perhitungan bantuan sosial untuk kategori Ibu hamil dibatasi maksimal kehamilan ke 2 (dua).
2. Jumlah Indeks Bantuan Tahun 2017 dan 2018 perhitungan bantuan adalah flat dimana sebuah keluarga penerima manfaat yang memiliki bayi, anak sekolah, ataupun sedang hamil diberikan bantuan sebesar Rp 1.890.000,- per tahun. Untuk keluarga yang anggotanya memiliki penyandang disabilitas dan/atau lansia, besaran bantuan yang diberikan adalah sebesar Rp 2.000.000,- per tahun. Tahun 2019, sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo, indeks bantuan dinaikkan dan dihitung berbasis komponen. Adapun skema besaran bantuan adalah
 - a. **Bantuan Tetap**
 1. Reguler : Rp 500.000,-
 2. Akses : Rp 1.000.000,-
 - b. **Bantuan Komponen**

1. Ibu Hamil : Rp 2.400.000,-
2. Anak Usia Dini : Rp 2.400.000,-
3. SD : Rp 900.000,-
4. SMP : Rp 1.500.000,-
5. SMA : Rp 2.000.000,-
6. Disabilitas Berat : Rp 2.400.000,-
7. Lanjut Usia : Rp 2.400.000,-

Bantuan tetap diberikan secara bertahap sebanyak 4 x setahun dan dievaluasi komitmennya setiap tahap (triwulan). Namun tahap IV Tahun 2019 sesuai dengan surat Kementerian Sosial RI Nomor: 1497/LJS.JSK/BS.01.03/9/2019 tanggal 30 September 2019 tentang Pemberitahuan Penyesuaian Indeks Bantuan Sosial PKH Tahap IV Tahun 2019 di hitung berbasis komponen. Adapun skema besaran bantuan tahap IV Tahun 2019 adalah :

Berdasarkan data dari BPS Kota Binjai dalam Angka tahun 2019, diketahui bahwa jumlah penduduk yang ada adalah sebesar 273.892 jiwa dimana wilayah dengan populasi terbesar adalah Kecamatan Binjai Utara (78.831 jiwa),. Sementara itu, wilayah dengan jumlah penduduk yang terkecil adalah Kecamatan Binjai Kota (28.302 jiwa). Jumlah penduduk miskin di Kota Binjai pada Tahun 2018 sebanyak 16.070 jiwa (5,88%). Berdasarkan database PKH di Kota Binjai per Desember 2019, diketahui bahwa sebanyak 115 Keluarga Penerima Manfaat PKH sudah berhasil keluar dari kemiskinan atau meningkat taraf ekonominya sehingga keluar dari PKH secara Mandiri atau GRADUASI MANDIRI. Jika diproyeksikan dari data Tahun 2018, maka dapat dipastikan sebanyak 460 jiwa Pengentasan Kemiskinan terjadi di Kota Binjai khususnya melalui Program Keluarga Harapan. Sehingga dapat dikatakan bahwa PKH merupakan salah satu program pemerintah yang mampu ikut

menurunkan persentase angka kemiskinan di Kota Binjai. Kontribusi terbesar berasal dari Kecamatan Binjai Selatan yakni sebesar 46 Keluarga yang sudah berhasil Graduasi Mandiri atau 2,8% dari total penerima PKH.⁵⁸

2. Visi dan Misi Dinas Sosial dan Tujuan PKH

Adapun Visi dan Misi Dinas Sosial adalah :⁵⁹

Visi Dinas Sosial Kota Binjai :

“ TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT KOTA BINJAI
YANG NYAMAN DAN SEJAHTERA ”

Misi Dinas Sosial Kota Binjai tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan aksesibilitas perlindungan sosial bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan kesejahteraan sosial bagi PMKS. Misi ini dimaksudkan agar masyarakat secara mudah mendapatkan program pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraannya
2. Mengembangkan perlindungan dan Jaminan sosial bagi PMKS. Pemerintah Kota Binjai berupaya terus untuk mengembangkan program perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat kategori PMKS
3. Meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan dan pelayanan perlindungan, jaminan, pemberdayaan, rehabilitasi dan penanggulangan kemiskinan. Misi ini dimaksudkan agar program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial

⁵⁸ Sumber data dari Laporan Tahunan 2019 Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Binjai Oleh Koordinator Kota PKH - Kota Binjai Syaiful Khalifah (Ipoel) pada tanggal 31 Desember 2019.

⁵⁹ Sumber Dari Kantor Dinas Sosial Kota Binjai.

terlaksana secara maksimal sehingga hasil yang diperoleh yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat tercapai juga secara maksimal

4. Meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetia kawan sosial untuk menjadi keberlanjutan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Peran serta masyarakat masih sangat diperlukan dalam upaya pencapaian kesejahteraan sosial masyarakat bersama – sama pemerintah. Dalam hal ini nilai – nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawaan merupakan dasar mewujudkan kebersamaan antara masyarakat dan pemerintah.

Adapun hal yang diteliti disini adalah PKH yang merupakan bagian dari Dinas sosial. Visi dan Misi Dinas Sosial merupakan bagian dari PKH juga sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena dinaungan kementerian Sosial RI.

Tujuan Berdirinya Program Keluarga Harapan (PKH)

Adapun Tujuan PKH didirikan adalah :

- 1) **Taraf Hidup** Meningkatkan Taraf Hidup KPM yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.
- 2) **Kurangi Beban** Mengurangi Beban Pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
3. **Perubahan Perilaku** Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima Manfaat (KPM) dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial.

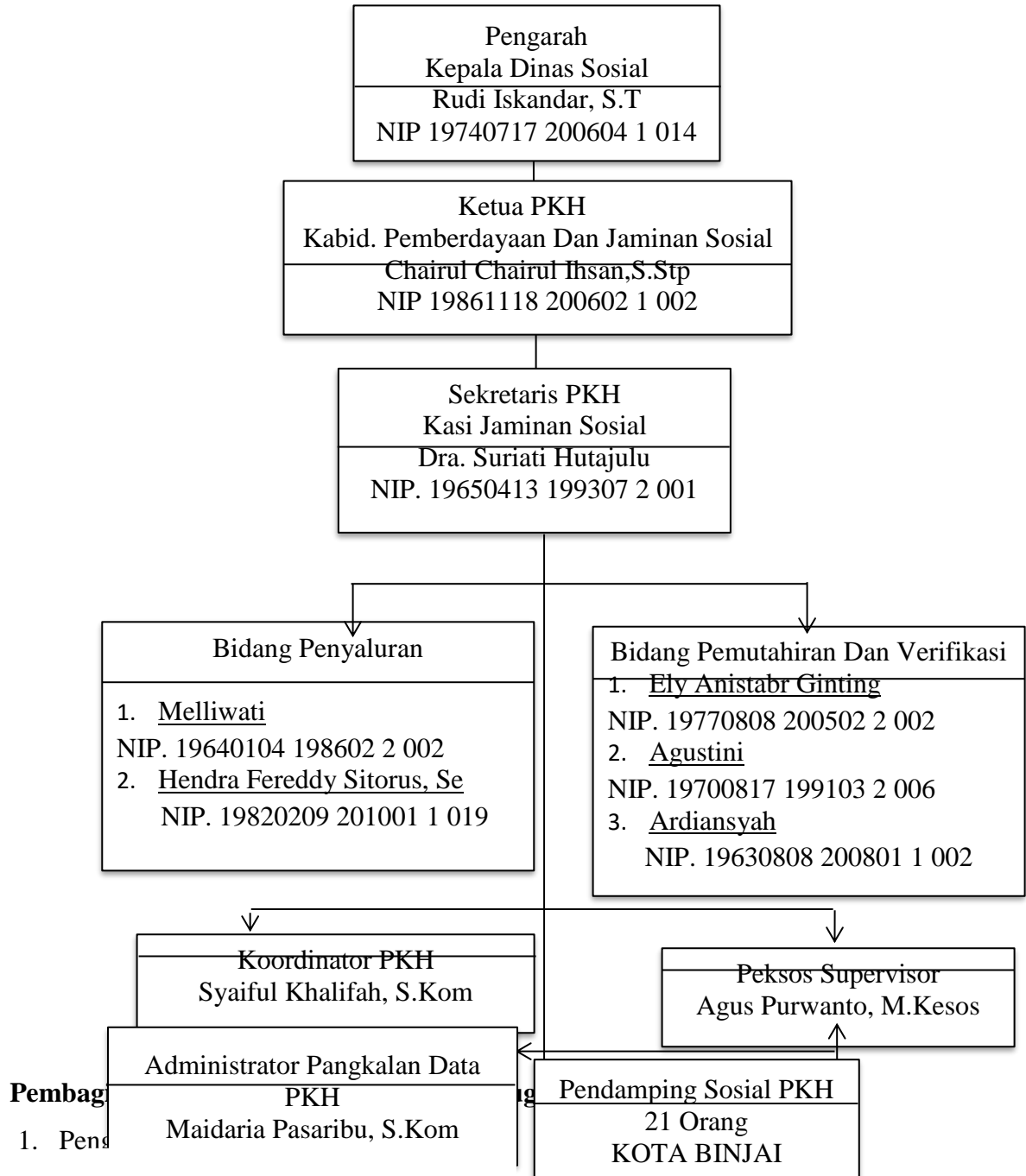
4. **Mengurangi Kemiskinan** Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial.
5. **Inklusi Keuangan** Mengenalkan Keuangan formal yaitu Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga penerima manfaat.⁶⁰

⁶⁰ Sumber data dari Laporan Tahunan 2019 Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Binjai Oleh Koordinator Kota PKH - Kota Binjai Syaiful Khalifah (Ipoel) pada tanggal 31 Desember 2019.

3) Struktur Organisasi PKH

Berikut Adalah Strukur Organisasi PKH adalah :

STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANA PROGRAM KELUARGA HARAPAN KOTA BINJAI



Gambar 4.1 Stuktur PKH Kota Binjai

Tugas Pengarah adalah:

1. memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan PKH kepada satker kementerian negara/lembaga, berdasarkan laporan dari Koordinator Umum/Koordinator PKH
 2. meminta pertanggungjawaban dari Koordinator Umum/Koordinator PKH dan memantau pelaksanaan kegiatan PKH kepada satker Kementerian Negara/Lembaga;
 3. mengevaluasi Laporan Pelaksanaan PKH;
 4. memantau dan mengevaluasi perkembangan/kemajuan hasil pelaksanaan PKH
2. Ketua PKH
- 1) Unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris PKH
 - 2) Membantu Kepala Dinas melaksanakan unsur pemerintahan bidang sosial dan tugas pembantuan sesuai dengan kebijakan Kementerian Sosial RI.
 - 3) Ketua PKH sosial menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan di bidang PKH
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang PKH
 - c. Pelaksanaan evaluasi di pelaporan di bidang PKH
 - d. Pelaksanaan administrasi inas di bidang PKH dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas Sosial, Pemerintah Kementerian Sosail RI sesuai tugas dan fungsinya.
3. Sekretaris PKH

Sekretariat PKH dipimpin oleh seorang Sekretaris berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab Ketua PKH dengan tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, bidang Penyaluran, Bidang Pemuktahiran dan verifikasi, Koordinator, Peksos Supervisor, Administrator pangkalan data dan Pendamping Sosial PKH.

4. Bidang Penyaluran

- 1) Menyalurkan Bantuan PKH yang bersifat Tunai maupun Non Tunai kepada masyarakat penerima PKH atau KPM (Keluarga Penerima Manfaat).
- 2) Mengecek Penyaluran yang sudah dilakukan melalui Pendamping Sosial PKH.

5. Bidang Pemuktahiran dan verifikasi

- 1) Verifikasi Komitmen anggota KPM PKH Anggota KPM PKH mengakses layanan fasilitas kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.
- 2) Pemuktahiran Data Memastikan setiap ada perubahan sebagian atau seluruh data KPM PKH.
 - a. Pemutakhiran Anggota Keluarga
 - b. Perubahan tempat tinggal
 - c. Kelahiran anggota keluarga
 - d. Penarikan anak-anak dari program (kematian, keluar/pindah sekolah, dan sebagainya)
 - e. Masuknya anak-anak baru ke sekolah

- f. Ibu hamil
- g. Perbaikan nama atau dokumen-dokumen
- h. Perubahan nama ibu/perempuan penerima PKH (menikah/cerai, meninggal, pindah/bekerja di luar domisili)
- i. Perubahan fasilitas kesehatan yang diakses

Pemutakhiran Program Komplementer

NIK, KIS, KIP, Program Sembako

6. Bidang Administrator Pangkalan Data PKH

- 1) Menerima data dan formulis terkait validasi calon KPM PKH, verifikasi komitmen dan pemutakhiran data KPM PKH serta mendistribusikannya kepada seluruh pendamping sosial sesuai wilayah kerjanya.
- 2) Menerima, memverifikasi dan mengelola data hasil validasi, verifikasi komitmen, pemutakhiran data dan realisasi penyaluran bantuan dari seluruh bantuan dari seluruh pendamping sosial dalam aplikasi SIM PKH.
- 3) Menyiapkan kebutuhan data dan administrasi kegiatan bagi pemangku kepentingan di kabupaten atau kota.
- 4) Melaporkan secara berkala perkembangan pelaksanaan PKH di wilayah kerjanya kepada koordinator kabupaten atau kota dan dinas sosial kabupaten kota.

7. Tugas Koordinator PKH

- 1) Melakukan komunikasi dan koordinasi terkait sosialisasi dan pemasaran sosial PKH kepada pihak-pihak terkait dan masyarakat umum di kabupaten kota lokasi tugas.
- 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pertemuan awal dan validasi calon KPM PKH pada seluruh kecamatan atau kota lokasi tugas.
- 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pelaporan kegiatan verifikasi KPM PKH pada seluruh kecamatan di kabupaten atau kota lokasi tugas.
- 4) Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pamtakhiran KPM PKH pada seluruh kecamatan di kabupaten atau kota lokasi tugas.
- 5) Mengkoordinasikan pengelolaan data atau dokumen terkait dengan hasil validasi calon KPM PKH, hasil verifikasi keomitmen komponen PKH, hasil pamtakhiran KPM PKH, realisasi penyaluran bantuan PKH, serta data atau dokumen PKH lainnya di kabupaten atau kota lokasi tugas.
- 6) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan PKH serta tindak lanjut pelaporan rekonsiliasi realisasi penyaluran bantuan PKH pada seluruh kecamatan di kabupaten atau kota lokasi tugas.
- 7) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) KPM PH pada seluruh kecamatan di kabupaten atau kota lokasi tugas.
- 8) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan serah terima teknis bagi pendamping sosial dan administrasi sosial dan administrator database dan SPM PKH.

- 9) Mengkoordinasikan serta memfasilitasi penanganan pengaduan dan permasalahan pelaksanaan PKH di seluruh kecamatan pelaksana PKH di kabupaten atau kota lokasi tugas.
- 10) Melakukan pembinaan, peningkatan kapasitas serta penilaian kinerja dan kompetensi pendamping sosial dan adminisitrator database dan SPM PKH di kabupaten atau kota lokasi tugas.
- 11) Melakukan mediasi, fasilitasi dan advokasi kepada KPM PKH untuk mendapatkan bantuan PKH dan bantuan dari program komplementer seperti BPNT, KIS, KIP, bantuan sosial atau subsidi lainnya

8. Bidang Paksos Supervisor

Peran pekerja sosial supervisor akan tampak pada 4 tugas yang dilaksanakan yaitu:

1) Memonitoring pelaksanaan P2K2/FDS

Pertama, memastikan proses Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau Family Development System (FDS) dapat berlangsung dengan baik.

2) Manajemen Kasus

Yakni prosedur untuk mengkoordinasikan seluruh pihak, layanan dan atau profesi dalam membantu KPM.

3) Penanganan Pengaduan

Ketiga, Penanganan Pengaduan. Misalnya terjadi keterlambatan pencairan bansos karena persoalan teknis, seorang Peksos Supervisor harus membantu memberikan sosialisasi ke masyarakat bahwa bantuan akan dirapel di

pencairan

4) Media promosi dan Informasi

Keempat, Media Informasi dan Promosi. Yakni mengumpulkan dan menyampaikan kisah sukses KPM PKH kepada publik melalui tulisan, video testimoni KPM, maupun foto-foto yang dapat disampaikan melalui media sosial dan media massa.

9. Tugas Pendamping Sosial dan Pendamping Sosial Akses

- 1) Menyusun rencana kerja PKH di wilayah dampungannya.
- 2) Melakukan sosialisasi PKH kepada aparat pemerintah tingkat kecamatan, desa atau kelurahan, calon KPM PKH dan masyarakat umum.
- 3) Melakukan pemetaan dan organisasi kelompok KPM PKH berdasarkan kedekatan geografis.
- 4) Melaksanakan proses bisnis PKH yang meliputi validasi, penyaluran bantuan, verifikasi, pemutakhiran data, pertemuan bulanan P2K2 dan KPM mandiri.
- 5) Memastikan KPM memperoleh bantuan program komplementer seperti BPNT, KIS, KIP, bantuan sosial atau subsidi lainnya.
- 6) Melakukan pendampingan PKH melalui mediasi, fasilitasi dan advokasi guna perubahan perilaku KPM PKH.
- 7) Menyusun laporan pelaksanaan P2K2 kepada koordinator kabupaten atau kota dan dinas sosial kabupaten atau kota secara berkala.
- 8) Menyusun laporan pelaksanaan PKH kepada koordinator kabupaten atau kota secara berkala.

4. Prosedur Penerima PKH

a. Syarat Penerima PKH

1. Berada di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
2. Memenuhi komponen-komponen calon penerima Program Keluarga Harapan, minimal 1 saja di dalam keluarga itu ada. Yaitu :
 - a. Komponen Kesehatan (Kategori : Ibu Hamil & Anak Usia 0-6 Thn)
 - b. Komponen Pendidikan (Kategori : Anak Sekolah SD, SMP, SMA)
 - c. Komponen Kesejahteraan Sosial (Kategori : Lansia 70 Thn keatas & Penyandang Disabilitas Berat)

Kalau Ada Keluarga Miskin Belum Dapat PKH, Berikut Langkah Langkahnya :

1. Cek apakah Keluarga itu masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan sosial (DTKS), bisa melalui :
 - a. Datang langsung ke Kelurahan masing-masing, atau
 - b. Website Kementerian Sosial RI <https://cekbansos.siks.kemsos.go.id/>
2. Apabila Keluarga tersebut sudah masuk kedalam Data Terpadu Kesejahteraan sosial (DTKS), maka tinggal menunggu suatu saat ada penambahan/perluasan penerima pkh dari pusat.
3. Apabila namanya ada tercantum pada daftar Calon Penerima PKH dari Pusat, akan ada proses selanjutnya yaitu Validasi data. Validasi adalah proses pencocokan data dengan kondisi terkini yang dilakukan oleh pendamping sosial PKH.

Bagaimana Kalau Keluarga Tersebut Tidak Ada Didalam DTKS ? :

1. Keluarga tersebut bisa melakukan pengusulan dirinya kepada pihak Kelurahan supaya bisa dimasukkan dalam DTKS. Usulan akan ditampung/dimusyawarahkan dengan tokoh masyarakat.
2. Hasil Musyawarah Kelurahan ini akan disampaikan ke Dinas Sosial untuk kemudian dilakukan Verifikasi sesuai mekanisme yang ada hingga dikirim Kementerian Sosial

b. Penetapan Calon Peserta PKH

1. Sumber data

- 1) **Data Terpadu Kesejahteraan Sosial** (Permensos No 11/2019)
- 2) **Pengecualian untuk:**
 - a) Korban bencana alam
 - b) Korban bencana sosial
 - c) Komunitas Adat Terpencil

2. Penetapan Lokasi (bdsk provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan)

- a) Penetapan wilayah kepesertaan
- b) Penetapan jumlah calon Keluarga Penerima Manfaat

Penetapan calon peserta PKH **ditetapkan** oleh **Direktur Jaminan Sosial Keluarga**⁶¹

c. Kriteria Penerima Manfaat dalam PKH

⁶¹ Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tanggal 8 Januari 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pasal 33 & 34.

1) Komponen Kesehatan

Kategori

- 1) **Ibu Hamil** Maksimal 2 kali kehamilan
- 2) **Anak Usia Dini** Usia 0 s/d 6 tahun, maksimal 2 (dua) anak .

2) Komponen Pendidikan

Kategori

- 1) **Anak SD/MI sederajat** Anak usia 6 s/d 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.
- 2) **Anak SMP/MTs sederajat** Anak usia 6 s/d 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.
- 3) **Anak SMA/MA sederajat** Anak usia 6 s/d 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.

d. Komponen Kesejahteraan Sosial

Kategori

- 1) Lanjut Usia (lansia) 70 tahun+ Maksimal 1 orang dan berada dalam keluarga
- 2) Penyandang Disabilitas Berat Maksimal 1 orang dan berada dalam keluarga (tuna daksa atau keterbelakangan mental)

5. Logo PKH

Konsep dasar Logo :

Unsur manusia sebagai pelaku aktivitas program baik sebagai pelaksana maupun sebagai penerima menjadi dasar dari figure visual logo yang berorientasi

kemanusiaan.



Gambar
4.2
Logo
PKH
Elemen

n dasar Logo :

- 1) **Bulatan empat** Sebagai satu kesatuan elemen kurva, bulatan adalah visualisasi dari individu yang menjadi sasaran dari program yaitu keluarga yang secara natural dalam kondisi lengkap terdiri dari ayah, ibu dan anak.
- 2) **Kurva tangan dan badan** Dalam satu ikatan keluarga yang harmonis terikat dalam rangkuan seorang kepala keluarga yang bertanggung jawab dan melindungi keluarga. Disisi lain tangan merengkuh teks program, menyiratkan dukungan program yang membantu memperkokoh sebuah kemandirian bangsa.

- 3) **Warna Biru Langit** Warna yang sangat bersahaja dan bersahabat serta menyiratkan sebuah ketenangan atau ketentraman yang dalam hal ini terkait dengan program harapan keluarga yang diharap mampu meningkatkan kesejahteraan dan ketenangan masyarakat kurang mampu.
- 4) **Warna Orange** Sebagai warna yang dinamis dan menonjol melukiskan semangat untuk menuju kearah yang lebih baik.
- 5) **Warna Biru Tua** Teks program dengan warna yang kokoh dan berwibawa menunjukkan kemantapan dan kesolidan dari program Keluarga Harapan.

6. Kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) bersama masyarakat

Sampai saat ini seluruh SDM PKH sudah saling bersinergi dengan OPD terkait dan membangun hubungan komunikasi yang baik. Beberapa kegiatan positif juga sudah dilakukan dalam hal bekerjasama mensukseskan program-program pemerintah daerah maupun pusat. Beberapa kegiatan yang sudah dilakukan adalah ;

1. Bersinergi dengan tim penggerak PKK untuk pelaksanaan iva test di Kecamatan bagi KPM PKH
2. Bersinergi dengan Dinas Kesehatan dalam rangka kegiatan Posyandu Remaja di Kelurahan bagi anak KPM
3. Bersinergi dengan Kelurahan dalam kegiatan bakti sosial bersama KPM PKH
4. Bersinergi dengan Kelurahan dalam kegiatan senam untuk Lansia KPM PKH

5. Bersinergi dengan BNN dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melibatkan unsur Dinas Sosial, Tagana, dan PKH
6. Bersinergi dengan Babinkamtibmas dalam mengawal penyaluran bantuan sosial PKH
7. Pendamping Sosial PKH Mengikuti Apel di kantor kecamatan
8. Pendamping Sosial PKH Piket di sekretariat kecamatan⁶²

7. Capaian Pngentasan Kemiskinan Oleh PKH

Berdasarkan data dari BPS Kota Binjai dalam Angka tahun 2019, diketahui bahwa jumlah penduduk yang ada adalah sebesar 273.892 jiwa dimana wilayah dengan populasi terbesar adalah Kecamatan Binjai Utara (78.831 jiwa),. Sementara itu, wilayah dengan jumlah penduduk yang terkecil adalah Kecamatan Binjai Kota (28.302 jiwa).

Jumlah penduduk miskin di Kota Binjai pada Tahun 2018 sebanyak 16.070 jiwa (5,88%). Berdasarkan database PKH di Kota Binjai per Desember 2019, diketahui bahwa sebanyak 115 Keluarga Penerima Manfaat PKH sudah berhasil keluar dari kemiskinan atau meningkat taraf ekonominya sehingga keluar dari PKH secara Mandiri atau GRADUASI MANDIRI.

⁶² Sumber data dari Laporan Tahunan 2019 Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Binjai Oleh Koordinator Kota PKH - Kota Binjai Syaiful Khalifah (Ipoel) pada tanggal 31 Desember 2019.



Gambar 4.3 diagram Persentase Tingkat Graduasi Mandiri anggota PKH Kota Binjai

Sumber : data PKH Kota Binjai

Jika diproyeksikan dari data Tahun 2018, maka dapat dipastikan sebanyak 460 jiwa Pengentasan Kemiskinan terjadi di Kota Binjai khususnya melalui Program

Keluarga Harapan. Sehingga dapat dikatakan bahwa PKH merupakan salah satu program pemerintah yang mampu ikut menurunkan persentase angka kemiskinan di Kota Binjai. Kontribusi terbesar berasal dari Kecamatan Binjai Selatan yakni sebesar 46 Keluarga yang sudah berhasil Graduasi Mandiri atau 2,8% dari total penerima PKH.⁶³

⁶³ Sumber data dari Laporan Tahunan 2019 Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Binjai Oleh Koordinator Kota PKH - Kota Binjai Syaiful Khalifah (Ipoel) pada tanggal 31 Desember 2019.

B. Analisis Deskripsi Data Penelitian

1. Hasil Responden

Masalah dalam penelitian ini ditekankan untuk mengetahui pengaruh Program PKH terhadap penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Cengkeh Turi Binjai Utara. Responden dalam penelitian ini adalah Masyarakat Lingkungan Cengkeh turi yang merupakan Anggota PKH yang sudah bergraduasi mandiri dan memiliki sebuah Usaha dengan jumlah Sampel 30 orang Responden. Selanjutnya dalam profil responden diperinci menurut Usia Pekerjaan dan Penghasilan.

Tabel 4.1 Nama dan Jenis UMKM Responden

No	Nama Usaha	Jenis UMKM
1	Catering	Usaha Mikro/ Industri Rumahan
2	Jualan Jus	Usaha Mikro/ Industri Rumahan
3	Kedai Jajanan Ringan	Usaha Mikro/ Industri Rumahan
4	Kedai Kelontong	Usaha Mikro/ Industri Rumahan
5	Kedai Sampah	Usaha Mikro/ Industri Rumahan
6	Pedagang Sayuran	Usaha Mikro/ Industri Rumahan
7	Pemasok Gas	Usaha Mikro/ Industri Rumahan
8	Pembibitan Ikan laga	Usaha Mikro/ Industri Rumahan
9	Penjahit Baju Wanita	Usaha Mikro/ Industri Rumahan
10	Penjual Gorengan	Usaha Mikro/ Industri Rumahan
11	Penjual Ikan Gembung	Usaha Mikro/ Industri Rumahan
12	Penjual Ikan Teri	Usaha Mikro/ Industri Rumahan
13	Penjual Jamu	Usaha Mikro/ Industri Rumahan
14	Penjual Kopra	Usaha Mikro/ Industri Rumahan
15	Penjual Pecal	Usaha Mikro/ Industri Rumahan

16	Sarapan Pagi	Usaha Mikro/ Industri Rumahan
17	Ternak Bebek	Usaha Mikro/ Industri Rumahan
18	Warung Mie Sop	Usaha Mikro/ Industri Rumahan

Berdasarkan Hasil dari tabel di atas dapat dipahami bahwa semua jenis usaha yang dijalankan masih tergolong kecil atau usaha mikro/industry rumahan dimana pendapatan kekayaan pertahun hanya kurang lebih hingga 50 Juta saja hal ini diakibatkan belum maksimalnya antara perputaran modal dengan pendapatan jadi usaha kecil masih di posisi itu. Belum memiliki laba / keuntungan yang sangat besar karena modal juga terbatas. Dan dapat dipahami hampir keseluruhan masyarakat kecil membuka usaha di bidang pengolahan makanan ataupun bahan pangan.

Tabel. 4.2 Usia

USIA					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	30-35	9	30.0	30.0	30.0
	36-40	6	20.0	20.0	50.0
	41-45	8	26.7	26.7	76.7
	46-50	7	23.3	23.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

J

ika dilihat berdasarkan umur responden, maka jumlah terbanyak pada umur 30-35 Tahun, yaitu 30,0 %, peringkat kedua reponden terbanyak pada umur 41-45 Tahun, yaitu sebesar 26,7 %. Peringkat ketiga responden terbanyak umur 46-50 tahun yaitu, 23,3%. Sedangkan kisaran 36-40 tahun

yang terendah yaitu 20,0 %.

Tabel 4.3 Pekerjaan

		Pekerjaan			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Usaha Makanan	21	70.0	70.0	70.0
	usaha ternak	2	6.7	6.7	76.7
	Kedai	5	16.7	16.7	93.3
	Usaha Pakaian	2	6.7	6.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Kedua, jika dilihat dari Jenis Pekerjaan, tingkat tertinggi berada pada usaha makanan dengan jumlah 21 orang responden, yaitu 70,0% sedangkan yang kedua berada kedai dengan jumlah 5 orang responden, yaitu 16,7%, dan yang terendah persentasenya pada usaha ternak yaitu, 6,7% dan usaha pakaian (konveksi) yaitu, 6,7 %.

Tabel. 4.4 Jenis Pendapatan

		Pendapatan			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	> 2.000.000	9	30.0	30.0	30.0
	2.000.000 - 3.000.000	13	43.3	43.3	73.3
	> 4.000.000	8	26.7	26.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

dilihat dari pendapatan atau penghasilan dari berusaha UMKM responden umumnya adalah < Rp.2.000.000 dengan jumlah responden 9 orang (30,0%).

Responden dengan pendapatan Rp.2.000.000- Rp. 3.000.000 dengan jumlah responden 13 orang (43,3 %) dan responden dengan pendapatan > Rp.4.000.000 yaitu 8 orang (26,7 %).

a. PKH (Variabel X)

PKH adalah sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar masyarakat. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut.

Berbagai jenis program bantuan dari PKH yang dapat membantu kesejahteraan penerima bantuan PKH. Untuk mengetahui berapa persentase tanggapan penerima PKH yang membuat usaha dan sudah graduasi mandiri yang diperoleh secara parsial (keseluruhan) maka digunakan rumus sebagai berikut :

Akumulasi Jawaban Responden													
Variabel X (PKH)													
Sampel (n)	ITEM JAWABAN											X	X ²
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	2500
2	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	3	42	1764
3	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5	5	47	2209
4	4	4	4	3	4	3	5	3	4	4	3	37	1369
5	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	37	1369
6	4	4	4	3	4	3	5	3	5	5	5	40	1600
7	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	43	1849
8	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	2	41	1681
9	4	4	4	3	4	3	5	3	4	4	3	37	1369
10	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5	5	47	2209

11	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5	47	2209
12	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5	47	2209
13	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	36	1296
14	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5	47	2209
15	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5	47	2209
16	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5	47	2209
17	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5	47	2209
18	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	2500
19	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5	47	2209
20	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	49	2401
21	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5	47	2209
22	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	49	2401
23	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	49	2401
24	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	49	2401
25	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	2500
26	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	49	2401
27	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5	47	2209
28	5	5	5	4	4	4	4	4	4	3	42	1764
29	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	49	2401
30	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	2500
Total											1366	62766

$$P = \frac{f}{N} 100 \%$$

Keterangan :

P = Persentase

f = Frekuensi jawaban responden

N = Total Frekuensi

= Jumlah soal x Jumlah Responden x Nilai Tertinggi

= 10 item x 30 Sampel x 5 scorsing

= 1500

Maka, persentase tanggapan masyarakat Penerima KPM (Keluarga

Penerima Manfaat) terhadap penanggulangan kemiskinan di daerah KelurahanCengkeh Turi Binjai Utara yaitu :

$$P = \frac{1366}{1500} \times 100 \%$$

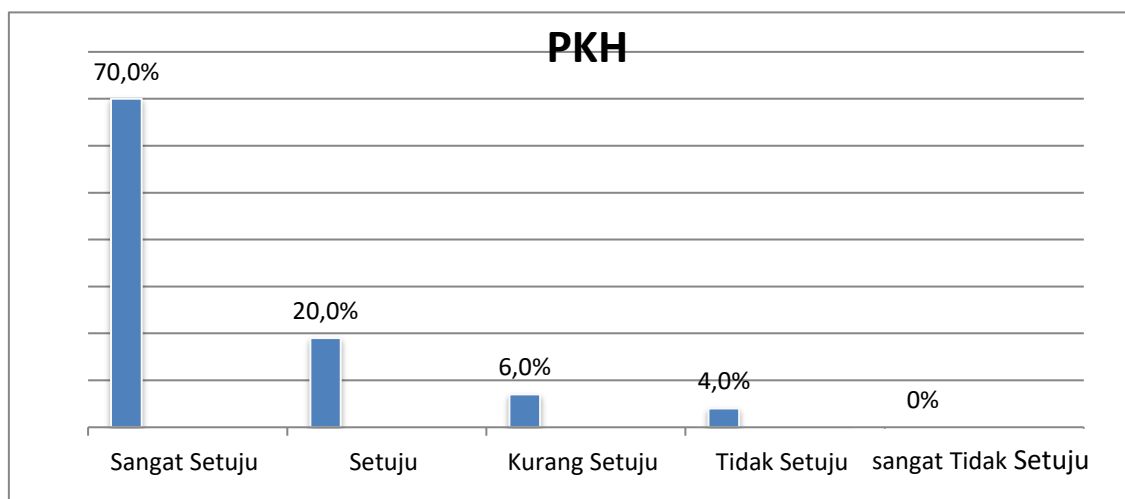
$$= 91,06 \%$$

$$= 91 \%$$

Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya Program PKH sangat berpengaruh terhadap proses penanggulangan kemiskinan karena sangat membantu bagi masyarakat yang menerimanya walaupun dengan jumlah yang tidak begitu besar tetapi memiliki komponen yang beragam dan secara teratur.

Berikut untuk mengetahui pentingnya sebuah Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan tiap item pertanyaan yang ditampilkan pada diagram berikut :

Gambar 4.4 Diagram scoring PKH dari Hasil Jawaban Responden



Pada diagram di atas dapat dilihat scoring PKH untuk lebih jelas yaitu :

1. Item Sangat Setuju dengan nilai 5 berjumlah sebanyak 210 atau 70,0 %
2. Item setuju dengan nilai 4 berjumlah sebanyak 58 atau 20,0 %
3. Item Kurang setuju dengan nilai 3 berjumlah 20 atau 6,0 %
4. Item tidak setuju dengan nilai 2 atau sejumlah 12 atau 0,4 %
5. Item Sangat tidak setuju dengan nilai 1 berjumlah tidak ada atau 0%.

b. Penanggulangan Kemiskinan (Y)

Program dan soulusi pemerintah dalam penanggulangan masalah yang paling utama di Indonesia adalah kemiskinan dengan bantuan PKH tersebut apakah menurut KPM sudah memiliki pengaruh yang besar bagi pengendalian ekonomi keluarga tersebut. Bantuan yang diberikan dapat diolah dan adialokasikan kemana saja dan tepat tujuan dan sasaran atau tidak.

Untuk mengetahui berapa besar persentase tanggapan masyarakat penerima PKH atau KPM yang sudah bergraduasi mandiri ataupun masih menjadi PKH tetapi sedang menjalankan sebuah Usaha dan membangun usaha kecil tersebut yang diperoleh secara parsial (keseluruhan) :

Akumulasi Jawaban Responden												
Variabel Y (Kemiskinan)												
Sampel (n)	ITEM JAWABAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Y	Y2
1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	2500
2	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	41	1681
3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	2500

4	4	3	3	4	4	3	5	5	4	3	38	1444
5	4	3	3	4	4	5	5	5	4	3	40	1600
6	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	49	2401
7	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	41	1681
8	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	41	1681
9	4	3	3	4	4	3	5	5	4	3	38	1444
10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	2500
11	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	49	2401
12	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	49	2401
13	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	35	1225
14	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	2500
15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	2500
16	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	49	2401
17	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	49	2401
18	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	49	2401
19	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	49	2401
20	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	35	1225
21	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	2500
22	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	2500
23	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	49	2401
24	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	49	2401
25	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	49	2401
26	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	49	2401
27	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	35	1225
28	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	2500
29	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	2500
30	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	49	2401
Total											1382	64518

$$P = \frac{f}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P = Persentase

f = Frekuensi jawaban responden

N = Total Frekuensi

= Jumlah soal x Jumlah Responden x Nilai Tertinggi

= 10 item x 30 Sampel x 5 scorsing

= 1500

Maka persentase tanggapan masyarakat penerima PKH atau yang disebut KPM yang sedang memiliki usaha atau sedang membangun usaha kecil dan yang sudah bergraduasi mandiri :

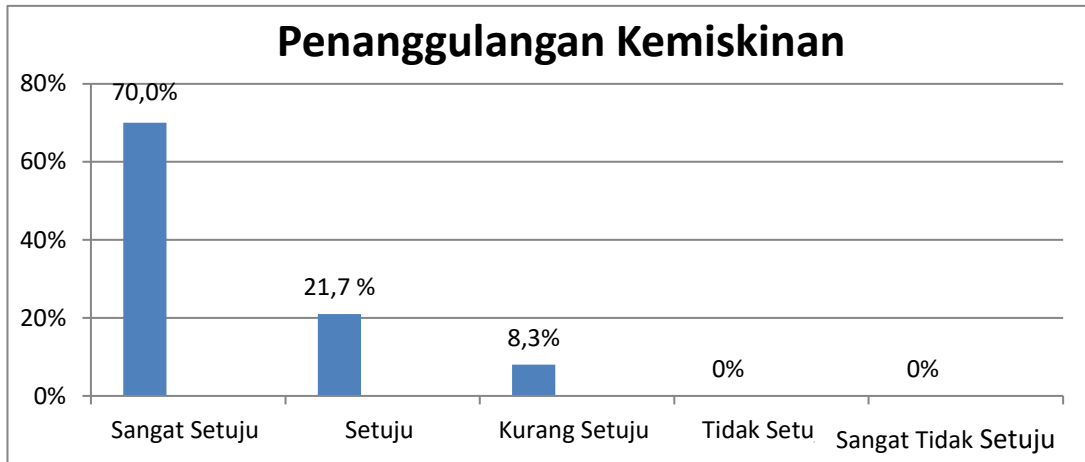
$$P = \frac{1382}{1500} \times 100 \%$$

= 92,13%

= 92 %

Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya Penanggulangan kemiskinan oleh masyarakat penerima PKH dan sudah bergraduasi mandiri di kelurahan cengkeh turi juga karena kemauan individu yang ingin telepeas dari kemiskinan agar uang bantuan yang di berikan akan produktif dengan hal kecil yang terus menerus akan menghasilkan pendapatan.

Berikut ini mengetahui bagaimana Penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Cengkeh Turi Binjai utara yang ditampilkan dalam diagram berikut :



Gambar 4.5 Diagram scoring Penanggulangan Kemiskinan dari Hasil Jawaban Responden

Pada diagram di atas dapat dilihat scoring PKH untuk lebih jelas yaitu :

1. Item Sangat Setuju dengan nilai 5 berjumlah sebanyak 210 atau 70,0 %
2. Item setuju dengan nilai 4 berjumlah sebanyak 65 atau 21,7 %
3. Item Kurang setuju dengan nilai 3 berjumlah 25 atau 8,3 %
4. Item tidak setuju dengan nilai 2 atau berjumlah tidak ada atau 0 %
5. Item Sangat tidak setuju dengan nilai 1 berjumlah tidak ada atau 0%.

C. Pengujian Hipotesis

1. Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengetahui apakah setiap item pertanyaan (angket) yang diajukan kepada responden adalah valid. Pengujian validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *bivariate correlate* dengan bantuan *IBM SPSS Statistics 22 for windows*. Hasil uji validitas data

Pearson Correlation	.224	.224	.224	.504*	.775**	-.140	1	.512*	.829*	.753*	.617**
Sig. (2-tailed)	.235	.235	.235	.005	.000	.461		.004	.000	.000	.000
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Pearson Correlation	.854**	.854**	.854**	.896*	.838**	.013	.512*	1	.793*	.710*	.920**
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.946	.004		.000	.000	.000
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Pearson Correlation	.539**	.539**	.539**	.740*	.888**	-.084	.829*	.793*	1	.937*	.854**
Sig. (2-tailed)	.002	.002	.002	.000	.000	.658	.000	.000		.000	.000
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Pearson Correlation	.455*	.455*	.455*	.668*	.841**	-.095	.753*	.710*	.937*	1	.797**
Sig. (2-tailed)	.012	.012	.012	.000	.000	.618	.000	.000	.000		.000
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Pearson Correlation	.836**	.836**	.836**	.857*	.917**	.236	.617*	.920*	.854*	.797*	1
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.210	.000	.000	.000	.000	
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Validitas setiap item ditunjukkan oleh kolom total. Berdasarkan r tabel, nilai *person correlation* minimal adalah 0,236 karena menggunakan 30 responden (N) dengan batas 0,05 . hal ini ditandai dengan tanda * atau ** pada kolom total tabel output. Sehingga 10 item kuesioner variabel X ini sudah valid.

Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.004		.000	.000
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Pearson Correlation	.591*	.748*	.748*	.363*	.591**	.566**	.302	.201	.724*	1	.708**
Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000	.049	.001	.001	.105	.287	.000		.000
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Pearson Correlation	.978*	.976*	.976*	.701*	.978**	.908**	.756*	.691*	.963*	.708**	1
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Variabel setiap item ditunjukkan oleh kolom total. Berdasarkan r tabel, nilai *person correlation* minimal adalah 0,691 karena menggunakan 30 responden (N) dengan batas 0,05. Hal ini ditandai dengan tanda * atau ** pada kolom total di tabel output. Sehingga 10 item kuesioner variabel Y ini sudah valid.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah istilah yang dipakai yang untuk menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran relative konsisten apabila pengukuran diulangi dua kali atau lebih. Reabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau diandalkan. Mengingat alat ukur yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel dalam penelitian ini adalah kuesioner maka perlu diuji reliabilitas setiap variabel yang digunakan dengan melihat.

Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas

Program Keluarga Harapan (PKH)	
Cronbach's Alpha	N of Items
.855	10

Kemiskinan	
Cronbach's Alpha	N of Items
.958	10

Sumber : Kuesioner, data diolah Penulis, 2020

Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai *Cronbach Alpha* berkisar antara 0,958 sampai dengan 0,855. Berdasarkan ketemtuan nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,6 maka dikatakan reliabel. Dengan demikian item pernyataan pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) sudah reliabel dan dapat dilanjutkan untuk pengajuan hipotesis, Karena masing-masing variabel memiliki nilai *Cronbach Alpha* di atas 0,6.

3. Uji Normalitas

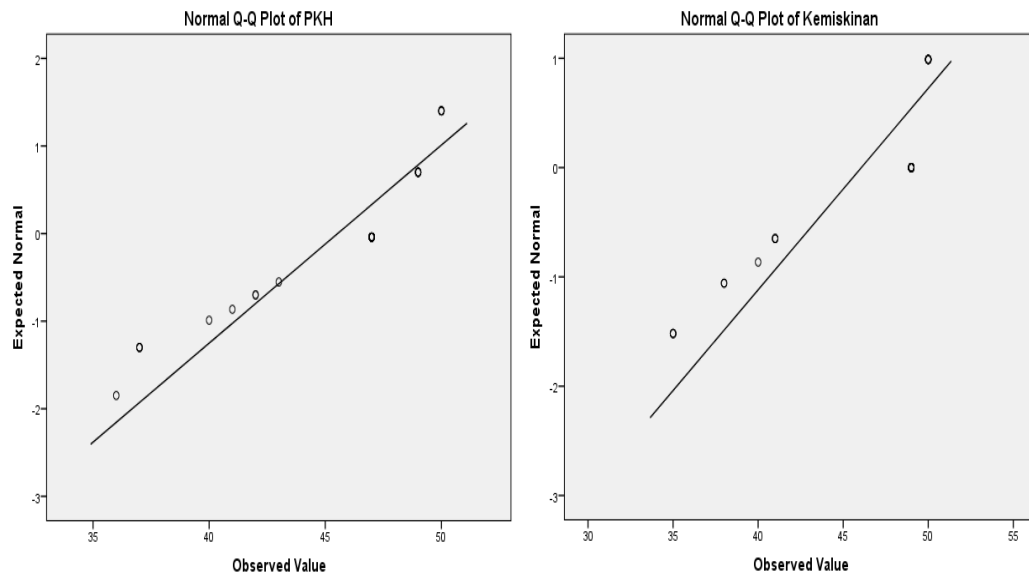
Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam menggunakan analisis jalur bahwa data yang digunakan bersifat normal. Untuk itu maka terlebih dahulu perlu dilakukan uji normalitas data yang tujuannya dalah untuk menguji apakah yang digunakan dalam penelitian telah distribusi normal.

Adapun pengujian normalitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kurva P-P Plots. Berikut ini adalah hasil

dari uji normalitas menggunakan pendekatan kurva P-P Plots.

Gambar 4.1 Uji Normalitas P-Plot

Berdasarkan gambar di atas grafik P-Plot terlihat bahwa titik-titik



menyebar di sekitar garis diagonal dan

mengikuti arah garis diagonal, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel hasil output dikatakan normal.

4. Uji Regresi Nilai Linear Sederhana

Dengan hasil analisis data maka diperoleh nilai-nilai yang dibutuhkan untuk Analisis regresi sederhana dengan perhitungan menggunakan *IBM SPSS Statistics 22 for windows* mendapatkan hasil :

Tabel 4.8 Uji Regresi Nilai Linear Sederhana

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	11.649	8.351		1.395	.174
PKH	.756	.183	.616	4.140	.000

a. Dependent Variable: Y (Penanggulangan Kemiskinan)

Dengan demikian diperoleh persamaan regresi antara variabel PKH dengan Penanggulangan Kemiskinan pada masyarakat penerima PKH yang membuka usaha maupun yang sudah graduasi mandiri sebagai berikut :

$$Y=11,6 + 0,756X$$

Dari hasil persamaan di atas diartikan bahwa konstanta sebesar 11,6 artinya tanpa adanya PKH, Penanggulangan kemiskinan sebesar 11,6 %. Memiliki arah hubungan positif (+) yang dimana PKH berpengaruh positif terhadap penanggulangan kemiskinan, serta koefisien regresi sebesar 0,756 %.

5. Uji Korelasi (Uji T)

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel. dilihat pada t tabel dengan tingkat signifikan 5% dengan sampel sebanyak 30 responden. Maka $df= n-k-1$ atau $df=30-2-1 =27$. Maka besarnya t tabel dalam penelitian ini adalah 1,703 Dengan hasil analisis data maka diperoleh nilai-nilai yang dibutuhkan untuk Uji Korelasi (Uji t) dengan perhitungan menggunakan *IBM SPSS Statistics 22 for windows* mendapatkan

hasil :

Tabel 4.9 Uji Korelasi (Uji T)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	11.649	8.351		1.395	.174
PKH	.756	.183	.616	4.140	.000

a. Dependent Variable: Y (Penanggulangan Kemiskinan)

Hasil pengujian Parsial (Uji t) antara variabel X dan variabel Y menunjukkan bahwa nilai t hitung $0,756 < t$ tabel sebesar 1.703 maka H_0 diterima dan H_a ditolak pada tingkat signifikansi 5% yang artinya bahwa variabel PKH secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penanggulangan Kemiskinan.

6. Koefisien Product Moment

Untuk mengetahui koefisien korelasi antara Program PKH dengan Penanggulangan Kemiskinan maka digunakan teknik analisa data dengan menggunakan pengkorelasian product moment, yang dimana untuk mempermudah yaitu menggunakan pengujian *IBM SPSS Statistics 22 for windows*, sehingga dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.10 Koefisien Korelasi

		PKH	Kemiskinan
PKH	Pearson Correlation	1	.616**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	30	30
Kemiskinan	Pearson Correlation	.616**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan tabel output di atas, dapat diketahui nilai r hitung (*Pearson correlation*) antara Pengaruh Keluarga Harapan (X) dengan Penanggulangan Kemiskinan (Y) adalah sebesar 0,616 yang berarti dapat dikatakan bahwa ada hubungan atau korelasi antara variabel PKH dengan variabel Penanggulangan kemiskinan. Maka dapat disimpulkan bahwa hubungan 2 variabel besar atau kuat sesuai dengan ketentuan dimana nilai koefisien $0,6 \leq r < 0,8$ artinya memiliki Hubungan besar atau kuat.

7. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk mengetahui persentase (%) besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y, maka digunakan rumus Determinan yaitu :

$$D = (r_{xy})^2$$

$$D = (0,616)^2 \times 100 \%$$

$$D = 0,3795 \times 100 \%$$

$$D = 37,95 \%$$

Dari hasil di atas dapat diketahui bahwa Program Keluarga Harapan

(PKH) berpengaruh besar terhadap Penanggulangan Kemiskinan yang memiliki tingkat persentase 37,95 %.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan Rumusan masalah penelitian pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Penanggulangan kemiskinan. diketahui dengan Hasil uji yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

Berdasarkan data dari hasil uji-uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan rumusan masalah yang sudah diteliti maka peneliti mendapatkan hasil bahwa Program PKH berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap penanggulangan kemiskinan di kelurahan cengkeh Turi Binjai Utara. Dari nilai uji regresi didapat hasil sebesar 11,6 artinya tanpa adanya PKH, Penanggulangan tingkat kemiskinan sebesar 11,6 %. Dari Uji Koefisien Determinasi (R^2) pengaruh variabel X terhadap Y sebesar 3,7,95 % yang artinya PKH mendapatkan nilai kontribusi yang lumayan besar 37,8 % dalam penanggulangan kemiskinan di cengkeh Turi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis ingin memberikan saran kepada beberapa pihak yaitu:

1. Kepada Pihak pengelola PKH di Binjai Hendaklah data dengan keadaan yang sebenarnya bisa ditinjau secara rutin agar hasil dari penerimaan bantuan tersebut tepat sasaran dan tidak terjadi penyalagunaan bantuan yang bukan seharusnya didapat oleh penerima yang salah semestinya dan untuk pendamping PKH semoga tetap semangat dalam membimbing masyarakat penerima bantuan PKH yang disebut KPM (Keluarga Penerima Manfaat) bisa lebih produktif dalam mengelola dan mengalokasikan bantuan yang selama ini diberikan.
2. Kepada Dinas Sosial Hendaklah lebih sering mmemberi penyuluhan dan sosialisasi yang lebih khusus untuk pendataan masyarakat calon penerima dana bantuan untuk masyarakat yang sangat membutuhkan agar masyarakat yang

tertinggal informasi mengenai bantuan tidaklah ada, yang artinya semua akses bisa diikuti dan diprioritaskan yaitu rakyat miskin yang sangat membutuhkan.

3. Kepada Pihak Penerima Bantuan (KPM) hendaklah memanfaatkan bantuan yang sudah ada untuk keperluan yang paling penting dengan memprioritaskan dapat mencukupi kebutuhan dan berusaha yang lebih besar agar kedepannya tidak menjadi penerima bantuan tetapi menjadi pemberi. Hendaklah bekerja keras tidak mengharapkan bantuan terus-menerus jika sudah mampu dan mapan bisa mengeluarkan diri dari PKH dengan graduasi mandiri agar memberikan peluang buat masyarakat miskin lainnya yang membutuhkan dan belum merasakan bantuan tersebut sehingga Indonesia bisa mengurangi persentase tingkat kemiskinan dengan kesejahteraan masyarakatnya sesuai dengan tujuan utama PKH dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuddin, Nata, dkk, *Kajian Tematik Al-Quran tentang Konstruksi Sosial*, Bandung: Angkasa Raya, 2008.
- Agus Purwanto, Slamet, dkk , (2013), Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memutus Rantai Kemiskinan (Kajian Di Kecamatan Mojosari Kabupasri ten Mojokerto), *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol 16, No. 2 .
- Alauddin, LC, Muhammad, *Fungsi Umkm Dalam Meningkatkan Prekonomian Masyarakat*, qiema (qomarddin Islamic economy magazine) vol. 5 No.1, 2019.
- Amalia, Euis , *Keadilan Distributif dalam ekonomi islam* Jakarta : Rajawali Pers, 2009.
- Anwar, Tom, *Hakekat Kemiskinan Massa*, Jakarta:Sinar Harapan, 1983.
- Azhar, Saifudin , *Metode Penelitian, cet. Ke-2*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar Officent, 1999.
- Badan Pusat Statistik kota Binjai, *Kota Binjai Dalam Angka Binjai Municipality in Figures 202*), CV. Rilis Grafika : Binjai, 2020.
- Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (*Peraturan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/2016 tanggal 3 Mei 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin*).
- Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahan, *Alhidayah Tafsir Per kata Tajwid kode Angka*, Kalim kaya ilmu kaya hati, Banten : 2016.
- Edwin, Mustafa, *Proses penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Lembaga Penerbit Ekonomi
- Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2012.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat Sebagai Tiang Utama ekonomi Syariah*, Makalah disampaikan pada acaraSeminar Bulanan Masyarakat ekonomi Syariah, Jakarta : Aula bank Mandiri Tower, 2006.
- Huda, Nurul, dkk. *Ekonomi Pembangunan Islam*, Jakarta : Terbit Kencana, 2015.
- Ibn, Katsir, *Tafsīr al-Qur'ānil Adzim, juz I*, Beirut: Muassasah arrayan. Cet. IV 1998.
- Liahati , Dewi Citra Larasati, *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu*,

2018.

Liliweri, Alo, *Metode Penelitian Kuantitatif Ekonomi, sosiologi, Komunikasi, Administrasi, Pertanian dan lainnya*, Jakarta, Kencana: 2019.

N.H.T,Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta:Erlangga, 2004.

Nata, Abuddin, dkk, *Kajian Tematik Al-Quran tentang Konstruksi Sosial*, Bandung:Angkasa Raya, 2008.

Nurhadi, *Mengembangkan Jaminan Sosial Mengentaskan Kemiskinan, dan pertama*,Yogyakarta:Media Wacana, 2007.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Reinelda Tri Yunarni, Baiq, dkk, (2019), Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengurangi Angka Kemiskinan (Studi: Desa Daha Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu), *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* ISSN 2615-5826 , FISIP UM Mataram Vol. 7.

Sri Prawani Rejeki, Wi, (2006), Analisis Penanggulangan kemiskinan melalui implementasi program P2KP di Kota Semarang (studi kasus di kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun, 2000-2003), Semarang: *PT.Pustaka Rizki Putra*.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : ALFABETA, 2013.

Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Suroyo, Al dkk, *Agama dan Kepercayaan membawa Pembaruan*. Jogjakarta: Kanisius, 2006.

Thamrin, Djuni, Edi Suharto, *Program Keluarga Harapan (PKH): Memotong Mata Rantai Kemiskinan Anak Bangsa*, 2012.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta:Balai Pustaka, 1999.

Yuli rahmini suci, (2017),perkembangan umkm (usaha mikro kecil dan menengah) di Indonesia (*jurnal ilmiah cano ekonomos* vol. 6 no. 1).

